

IMPLEMENTASI PENDIDIKAN KARAKTER BAGI WARGA BINAAN PADA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II B KOTA GUNUNGSITOLI

by Zega Samahati

Submission date: 24-Jan-2024 05:15AM (UTC-0500)

Submission ID: 2277355899

File name: SAMAHATI_ZEGA.docx (199.41K)

Word count: 13093

Character count: 87088

**UNIVERSITAS
NIAS**



UNIAS

1
**IMPLEMENTASI PENDIDIKAN KARAKTER BAGI WARGA BINAAN PADA
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II B KOTA GUNUNGSITOLI**

SKRIPSI

Oleh:
SAMAHATI ZEGA
NIM. 192119043



UNIVERSITAS NIAS (UNIAS)
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN (FKIP)
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PANCASILA DAN
KEWARGANEGARAAN (PPKN)
OKTOBER 2023

**IMPLEMENTASI PENDIDIKAN KARAKTER BAGI WARGA BINAAN PADA
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II B KOTA GUNUNGSITOLI**

SKRIPSI

**Diajukan kepada
Universitas Nias (UNIAS)
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Dalam Menyelesaikan
Program Sarjana Pendidikan**

**Oleh:
SAMAHATI ZEGA
NIM. 192119043**

**UNIVERSITAS NIAS (UNIAS)
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN (FKIP)
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PANCASILA DAN
KEWARGANEGARAAN (PPKN)
OKTOBER 2022**

**IMPLEMENTASI PENDIDIKAN KARAKTER BAGI WARGA BINAAN
PADA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II B
KOTA GUNUNGSITOLI**

Oleh:

Samahati Zega

NIM 192119043

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah: (1) Mengetahui Implementasi pendidikan Karakter Bagi Warga Binaan pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Kota Gunungsitoli, (2) mengetahui faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan pendidikan karakter, dan (3) mengetahui upaya dari hambatan pelaksanaan pendidikan karakter.

Pendekatan penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Subjek penelitian adalah warga binaan dan petugas pemasyarakatan. Data dikumpulkan dengan observasi, wawancara dan studi dokumen dan dokumentasi. Analisis data meliputi reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian adalah: (1) pelaksanaan pendidikan karakter pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Kota Gunungsitoli berjalan sesuai tujuan pemasyarakatan. pendidikan karakter dilaksanakan melalui kegiatan jasmani, rohani, intelektual dan kemandirian, (2) faktor pendukungnya adalah warga binaan taat dan tertib; kerja sama dengan pihak ketiga; kebijakan wajib diikuti warga binaan. Faktor penghambatnya adalah kurangnya motivasi sebagian warga binaan; sarana prasarana dan anggaran terbatas; pemasaran sempit, dan (3) solusi dari hambatan adalah memberikan pengusulan cuti dan sanksi dimasukkan ke memotivasi warga binaan; mengajukan proposal ke Kantor Wilayah Hukum dan HAM.

Kata Kunci : *Implementasi pendidikan karakter*

KATA PENGANTAR

Peneliti mengucapkan puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Pengasih dan Penyayang berkat pertolonganNya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini tepat pada waktunya.

Judul skripsi yang telah peneliti rumuskan adalah: "¹*Implementasi Pendidikan Karakter Bagi Warga Binaan Pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Kota Gunungsitoli*". Peneliti menyadari di dalam penelitian skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan dan kelemahan, akan tetapi peneliti memperoleh bantuan dan kontribusi dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini dengan kerendahan hati peneliti mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya ⁵kepada

1. Bapak Ellyunus Waruwu, S.Pt., M.Si sebagai Rektor Universitas Nias.
2. Bapak Dr. Yaredi Waruwu, S.S., M.S sebagai Plt. Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP).
3. Bapak Syukur Kasieli Hulu, S.H., M.H sebagai Plt. Ketua Program Studi PPKn.
4. Bapak Armstrong Harefa, S.H., M.H sebagai Dosen Pembimbing yang telah membimbing, mengarahkan dan memfasilitasi peneliti sehingga pembuatan skripsi ini dapat selesai pada waktunya.
5. Bapak KALAPAS Kelas II B Kota Gunungsitoli yang telah memberikan izin untuk melakukan penelitian di Lembaga Pemasyarakatan yang dipimpin.
5. Bapak/Ibu Dosen di Universitas Nias khususnya di lingkungan Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan.

7. Kepada Orangtua tercinta yang senantiasa mendukung serta memberikan dorongan maupun motivasi serta doa kepada peneliti baik dari segi materil dan moril sehingga penelitian skripsi ini dapat terselesaikan.
8. Kepada keluarga, dan saudara/i yang telah mendukung serta mendoakan peneliti dalam pembuatan skripsi ini sehingga selesai tepat waktunya.
9. Kepada G.T Orang yang telah menemani, mendoakan serta memberi dukungan terbaik dan waktunya untuk senantiasa memotivasi peneliti sehingga skripsi ini selesai tepat waktunya.
10. Dan rekan-rekan mahasiswa khususnya pada Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Angkatan 2019 secara khusus dan secara umum kepada seluruh mahasiswa Universitas Nias.

Akhir kata, peneliti mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu kiranya Tuhan yang membalas kepada Bapak/Ibu dan saudara/i semua, Ya'ahowu.

Gunungsitoli, 22 September 2023

Peneliti

Samahati Zega

NIM. 192119043

DAFTAR ISI

	<i>Halaman</i>
<i>ABSTRAK</i>	i
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Fokus Penelitian	5
1.3 Rumusan Masalah	5
1.4 Tujuan Penelitian	5
1.5 Kegunaan Penelitian	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	7
2.1 Pendidikan Karakter	7
2.1.1 Pengertian Pendidikan.....	7
2.1.2 Pengertian Karakter.....	8
2.1.3 Pengertian Pendidikan Karakter.....	9
2.1.4 Tujuan Pendidikan Karakter	9
2.1.5 Nilai-nilai Pendidikan Karakter	12
2.2 Pengertian Warga Binaan (narapidana).....	13
2.2.1 Kewajiban Warga Binaan(narapidana)	14
2.3 Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS).....	15
2.3.1 Pengertian Lembaga Pemasyarakatan.....	15
2.3.2 Fungsi Lembaga Pemasyarakatan	16
BAB III METODE PENELITIAN	18
3.1 Pendekatan dan Jenis Penelitian	18
3.2 Variabel Penelitian	18
3.3 Lokasi dan Jadwal Penelitian	19
3.4 Sumber Data	21
3.5 Instrumen Penelitian	21

3.6 Teknik Pengumpulan Data	22
3.7 Teknik Analisis Data	23
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	26
4.1 Paparan Data	26
4.2 Hasil Penelitian	33
4.3 Pembahasan	41
4.4 Faktor Pendukung dan Penghambat.....	51
4.5 Solusi Dari Hambatan Implementasi Pendidikan Karakter	56
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	59
5.1 Kesimpulan	59
5.2 Saran.....	61
DAFTAR PUSTAKA	62
Lampiran	64

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Waktu Dan Jadwal Penelitian	20
2. Daftar Urut Pegawai LAPAS Kelas II B Kota Gunungsitoli	27
2. Jumlah Warga Binaan	32
3. Keadaan Sarana Dan Prasarana	32

DAFTAR GAMBAR

Tabel	Halaman
1. Bagan Teknik Pengumpulan Data	23
2. Bagan Analisis Data Interaktif Miles dan Huberman	24

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Masyarakat Indonesia terdiri dari berbagai macam suku, ras, bahasa dan budaya. Masyarakat merupakan insan yang memiliki pilihan, kebebasan dan tanggung jawab dalam menentukan masa depannya. Masyarakat Indonesia sebagai penerus bangsa harus mampu mewujudkan tujuan nasional Indonesia. Dalam mewujudkan tujuan nasional dibutuhkan masyarakat yang berakhlak, unggul dan berkualitas. Tujuan nasional yang dimaksudkan adalah tujuan nasional yang tertera dalam Pembukaan Undang-undang Dasar 1945 yaitu:

Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Terwujudnya insan yang berakhlak, berkualitas dan unggul tentu diperoleh dari pendidikan. Pendidikan merupakan sarana untuk mengembangkan potensi diri. Pendidikan yang baik akan membawa dan mengarahkan masyarakat ke arah masa depan yang baik pula. Pendidikan dituntut mampu menumbuhkan karakter pada diri individu. Abdullah Munir (2010:XII) menyebutkan bahwa “karakter adalah pisau bermata dua. Setiap karakter memiliki dua sisi yang saling bertolak belakang”. Anak yang memiliki keyakinan yang tinggi akan memiliki dua kemungkinan yang berbeda dan berlawanan. Kemungkinan yang pertama adalah tumbuhnya sifat berani sebagai buah keyakinan diri yang dimilikinya itu. Sedangkan kemungkinan yang kedua adalah munculnya sifat sembrono dan kurang perhitungan karena terlalu yakin dengan kemampuan atau kalkulasinya.

Saat ini, pendidikan karakter sedang digencar-gencarkan di Indonesia. Pendidikan karakter dinilai mampu menumbuhkan dan memperbaiki mental bangsa Indonesia. Hal tersebut selaras dengan pemikiran Raharjo dalam Zubaedi (2011:16) yang menyebutkan bahwa:

Pendidikan karakter suatu proses pendidikan secara holistik yang menghubungkan dimensi moral dengan ranah sosial dalam kehidupan peserta didik sebagai fondasi bagi terbentuknya generasi yang berkualitas yang mampu hidup mandiri dan memiliki prinsip suatu kebenaran yang dapat dipertanggung jawabkan.

Pendidikan karakter melalui pembinaan sejatinya merupakan pembinaan yang menanamkan nilai, sikap dan sifat serta norma-norma kedalam diri individu sedari kecil. Setiap individu pasti akan memperoleh pendidikan untuk pertama kalinya di lingkungan keluarga. Keluarga menjadi kunci bagaimana terbentuknya kepribadian seseorang. Pembinaan karakter dapat diartikan sebagai upaya penanaman kecerdasan dalam berpikir dan pembentukan sikap. “Pembinaan karakter tidak hanya proses mentransfer ilmu pengetahuan namun pendidikan karakter juga memerlukan proses tauladan dan pembudayaan dalam lingkungan individu dalam lingkungan masyarakat, keluarga maupun lingkungan media massa” (Zubaedi, 2011:17).

Keluarga adalah lembaga pertama yang memberikan pendidikan kepada seseorang. Bagaimana anak bertindak, bersikap dan berperilaku adalah cerminan bagaimana peran keluarga dalam memberikan pendidikan dan penanaman nilai serta moral. Namun demikian, keluarga bukanlah lembaga satu-satunya dalam membentuk kepribadian dan karakter individu. Kepribadian individu yang sudah tertanam kuat di dalam diri individu bisa jadi luntur akibat pengaruh lingkungan, pergaulan maupun media massa.

Pembinaan karakter merupakan salah satu kunci dalam membangun bangsa. Namun demikian, saat ini di Indonesia krisis karakter. Hal tersebut didukung dengan adanya banyak peristiwa kejahatan maupun tindak asusila masyarakat. Peristiwa tersebut antara lain adalah korupsi, pembunuhan, perampokan, tawuran, pemerkosaan dan masih banyak kasus asusila lainnya.

Secara umum lembaga pemasyarakatan adalah suatu tempat yang digunakan untuk mendidik para narapidana dalam masa tahanan agar narapidana dapat memperbaiki dirinya menjadi lebih baik.

Pembinaan merupakan sarana untuk mengembangkan potensi diri.

Pembinaan yang baik akan membawa dan mengarahkan masyarakat ke arah masa depan yang baik pula. Pembinaan dituntut mampu menumbuhkan karakter pada diri individu. Pembinaan karakter sejatinya merupakan pendidikan yang menanamkan nilai, sikap dan sifat serta norma-norma kedalam diri individu sedari kecil. Setiap individu pasti akan memperoleh pendidikan untuk pertama kalinya di lingkungan keluarga. Keluarga menjadi kunci bagaimana terbentuknya kepribadian seseorang. Pembinaan karakter dapat diartikan sebagai upaya penanaman kecerdasan dalam berpikir dan pembentukan sikap.

Pembinaan karakter merupakan salah satu kunci dalam membangun bangsa. Namun demikian, saat ini di Indonesia krisis karakter. Hal tersebut didukung dengan adanya banyak peristiwa kejahatan maupun tindak asusila masyarakat. Peristiwa tersebut antara lain adalah korupsi, pembunuhan, perampokan, tawuran, pemerkosaan dan masih banyak kasus asusila lainnya.

Tindakan pelanggaran hukum dapat terjadi karena banyak faktor, salah satunya globalisasi. Globalisasi memberikan dampak yang besar bagi masyarakat Indonesia. Masyarakat yang kurang bisa memilih dan memilah arus globalisasi akan terbawa arus negatif. Masnur Muslich (2004:1) berpendapat “bahwa hal itu terjadi karena globalisasi telah membawa kita pada perubahan materi sehingga terjadi ketidak seimbangan antara pembangunan ekonomi dan tradisi kebudayaan masyarakat”.

Era globalisasi memberikan dampak yang besar untuk pertumbuhan dan perkembangan diri manusia. Ketidaktepatan masyarakat menyikapi perubahan sosial akibat dampak dari globalisasi dapat memberikan pengaruh negatif kepada masyarakat. Pengaruh tersebut dapat menjadikan masyarakat melakukan penyimpangan sosial. Seperti yang telah disebutkan di atas, kasus kejahatan yang merupakan cermin krisis karakter bangsa merupakan wujud dari penyimpangan sosial.

Penyimpangan sosial sendiri disebabkan oleh banyak faktor. Faktor-faktor penyimpangan sosial antara lain adalah faktor keluarga, faktor lingkungan tempat tinggal, faktor pergaulan teman sebaya, media massa, ketidak sanggupan

menerapkan norma sosial dan masih banyak lainnya. Hal tersebut didukung dengan pernyataan yang dikemukakan oleh Susanto selaku Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) kepada Gresnews.com, Kamis 9 Oktober 2014 mengatakan bahwa:

Banyaknya kejahatan dan aksi kriminalitas yang dilakukan anak harus dilihat secara utuh, baik sebagai korban atau pelaku. Anak sebagai pelaku kriminalitas lebih banyak dipengaruhi faktor lingkungan yang tidak bersahabat, pengaruh media atau perlakuan teman sekelilingnya, Faktor lingkungan tersebut lambat laun akan menginspirasi anak untuk meniru. Tayangan televisi yang berisi pornografi, lalu games bernuasa kekerasan ikut berpengaruh pada perilaku anak. Anak melakukan dari apa yang mereka lihat, mereka rasakan.

Sampai pada saat ini sering kita lihat tentang tindak pidana yang terjadi di Indonesia, bahwa masyarakat Indonesia banyak melakukan pelanggaran hukum. Masyarakat yang melakukan kejahatan adalah masyarakat yang melanggar aturan dan hukum negara. Pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat tentu akan mendapatkan hukuman yang setimpal. Indonesia sebagai negara hukum memiliki undang-undang yang jelas mengenai tindak pidana maupun pelanggaran hukum. Di dalam undang-undang terdapat jenis pidana, lama hukuman, perlakuan hukum, hak dan kewajiban nara pidana dan lain sebagainya.

Masyarakat yang terbukti melanggar hukum akan mendapatkan hukuman penjara. Predikat narapidana disandang olehnya. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, "narapidana merupakan terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di lembaga pemasyarakatan". Narapidana yang sudah divonis hukuman secara otomatis akan menjadi warga binaan lembaga pemasyarakatan. Dalam sistem undang-undang tentang pemasyarakatan, narapidana memperoleh pembinaan dan pembimbingan, hak dan kewajiban sebagai warga binaan di lembaga pemasyarakatan maupun rumah tahanan.

Pendidikan yang diperoleh para narapidana berbentuk pembinaan dan pembimbingan. Hal tersebut tertera jelas di Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang pembinaan dan pembimbingan warga

binaan masyarakat. Kebijakan ini diwujudkan ke dalam program pembinaan kepribadian dan pembimbingan kemandirian. Kebijakan pembinaan dan pembimbingan merupakan wujud dari perbaikan moral para narapidana selama di lembaga masyarakat. Pembinaan dan pembimbingan diharapkan dapat menjadikan narapidana lebih bermoral.

Lembaga Masyarakat menurut Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang masyarakat adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik masyarakat. Provinsi Sumatera Utara memiliki lembaga masyarakat dan Rutan/Cab. Rutan sebanyak 37 Unit, terdiri dari 17 Lembaga Masyarakat dan 20 Rutan/Cab. Salah satu Lembaga masyarakat yang besar di Provinsi Sumatera Utara adalah Lembaga Masyarakat Kelas II B Kota Gunungsitoli. Lembaga Masyarakat Kelas II B Kota Gunungsitoli memiliki luas 7.500 m² dengan kapasitas hunian 181 orang. Dan saat ini dihuni 235 orang Narapidana.

Berdasarkan informasi yang didapat peneliti di Lembaga Masyarakat Kelas II B Kota Gunungsitoli, bahwa keadaan di dalam Lembaga Masyarakat Kelas II B Kota Gunungsitoli sangat baik, terbukti Lembaga Masyarakat Kelas II B Kota Gunungsitoli menyelenggarakan berbagai pembinaan terhadap Narapidana. Narapidana yang kehilangan kemerdekaannya bukan berarti tidak diperbolehkan melakukan apapun. Seorang narapidana memiliki hak, salah satunya adalah hak memperoleh pendidikan dalam bentuk pembinaan dan pengembangan. Selama tinggal di lembaga masyarakat, para narapidana dapat mengembangkan potensi dirinya melalui pendidikan yang dimaksud.

Wujud pemenuhan hak memperoleh pendidikan di Lembaga Masyarakat Kelas II B Kota Gunungsitoli dengan memberikan pembinaan kepada warga binaan masyarakat. Lembaga Masyarakat Kelas II B Kota Gunungsitoli menjadikan pembinaan bagi narapidana sebagai sarana untuk memberikan narapidana pendidikan karakter. Setiap narapidana memiliki karakter, kepribadian, watak dan minat serta bakat yang berbeda. Namun demikian, kegiatan pembinaan di Lembaga Masyarakat Kelas II B Kota Gunungsitoli tidak luput

dari beberapa kendala dalam pelaksanaannya.

Berdasarkan konteks penelitian diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengangkat judul “ **Implementasi Pembinaan Karakter Bagi Narapidana Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Kota Gunungsitoli.**”

1.2 Fokus Penelitian

Berdasarkan konteks penelitian diatas, maka fokus penelitian diarahakan pada “Implementasi Pembinaan Karakter Bagi Narapidana Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Kota Gunungsitoli.”

1.3 Rumusan Masalah

1. Bagaimana implementasi pembinaan karakter bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Kota Gunungsitoli ?
2. Apa saja faktor pendukung dan penghambat implementasi pembinaan karakter bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Kota Gunungsitoli ?
3. Bagaimana Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Kota Gunungsitoli mengatasi hambatan implementasi pembinaan karakter bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Kota Gunungsitoli ?

1.4 Tujuan penelitian

Tujuan penelitian merupakan harapan yang akan dicapai dalam suatu penelitian. Berdasarkan fokus penelitian diatas adapun tujuan yang hendak dicapai dalam pelaksanaan penelitian ini adalah :

1. Untuk Mengetahui bagaimana implementasi pembinaan karakter bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Kota Gunungsitoli.
2. Untuk Mengetahui apa saja faktor pendukung dan penghambat implementasi pembinaan karakter bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Kota Gunungsitoli.
3. Untuk Mengetahui bagaimana Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Kota Gunungsitoli mengatasi hambatan implementasi pembinaan karakter bagi

narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Kota Gunungsitoli.

1.5 Kegunaan hasil penelitian

Kegunaan penelitian merupakan hal manfaat yang ingin dicapai setelah dilaksanakan penelitian. Adapun yang menjadi kegunaan penelitian ini adalah:

1. Secara Umum
 - a) Memberikan informasi dan gambaran bagi semua pihak yang ingin mengetahui tentang implementasi pembinaan karakter bagi narapidana di lembaga pemasyarakatan.
 - b) Sebagai bahan referensi dan acuan bagi penelitian selanjutnya yang ingin mengkaji masalah dengan objek penelitian yang berbeda.
2. Secara Khusus
 - a) Bagi pemerintah, dapat dijadikan sebagai kebijakan dalam meningkatkan pembinaan karakter bagi narapidana.
 - b) Bagi pegawai lembaga pemasyarakatan, hasil penelitian ini diharapkan sebagai bahan informasi dan evaluasi terkait dengan penyelenggaraan kebijakan pembinaan karakter bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan, khususnya Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Kota Gunungsitoli.
 - c) Bagi peneliti, Penelitian ini memberikan pengalaman baru bagi peneliti di dalam lingkungan lembaga pemasyarakatan, serta memberikan wawasan kepada peneliti mengenai kebijakan pembinaan dan pembimbingan yang diimplementasikan di dalam lingkungan lembaga pemasyarakatan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pembinaan Karakter

2.1.1 Pengertian Pembinaan

Menurut KBBI Pembinaan adalah proses, perbuatan, cara membina, pembaharuan, penyempurnaan, usaha, tindakan, dan kegiatan yang dilakukan secara budaya guna dan berhasil untuk memperoleh hasil yang lebih baik. Karakter menurut Sigmund Freud dalam Sagala (2013:290) adalah “sekumpulan nilai yang terwujud dalam sistem daya juang dan menjadi landasan pemikiran, sikap dan perilaku seseorang”. Pendapat yang sama dikemukakan oleh Mulyasa (2013:3) “karakter adalah sifat alami seseorang yang merespon situasi secara bermoral dan diwujudkan dalam suatu tindakan nyata melalui perilaku dan nilai-nilai karakter lainnya kepada orang lain”.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang pembinaan warga binaan pemasyarakatan dan PP RI No 32 Tahun 1999 tentang syarat dan tata cara pelaksanaan hak warga binaan pemasyarakatan Pasal 1 menyatakan bahwa “pembinaan adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, profesional, kesehatan jasmani dan rohani narapidana dan anak didik pemasyarakatan”. Pelaksanaan pembinaan dan pembimbingan dilakukan oleh pembina dan pembimbing pemasyarakatan. Pembina Pemasyarakatan adalah petugas pemasyarakatan yang melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan di LAPAS. Sedangkan Pembimbing Kemasyarakatan adalah petugas pemasyarakatan yang melaksanakan pembimbingan Klien di BAPAS.

Pembinaan adalah suatu proses belajar dengan melepaskan hal-hal yang sudah dimiliki dan mempelajari hal-hal baru yang belum dimiliki, dengan tujuan membantu orang yang menjalaninya untuk membetulkan dan mengembangkan pengetahuan dan kecakapan yang sudah ada serta mendapatkan pengetahuan dan kecakapan baru untuk mencapai tujuan hidup dan kerja yang sedang dijalani 'bihefektif.

Adanya pembinaan membawa pengaruh pada orang yang menjalaninya, sikap orang tersebut dapat diubah menjadi manusia yang lebih baik, efisien dan efektif dalam bekerja. Menurut Thoha (2008:7) :

Pembinaan diartikan sebagai suatu tindakan proses, hasil atau pernyataan menjadi lebih baik. Dalam hal ini menunjukkan adanya kemajuan atau peningkatan dan pertumbuhan.

Jadi Pembinaan adalah suatu proses dimana narapidana dibina dengan serangkaian kegiatan baik itu dari segi rohani maupun jasmani untuk menjadi manusia yang lebih baik lagi dari sebelum ia melakukan tindak pidana, pembinaan merupakan tujuan sesungguhnya pada Lapas untuk menuntun para terpidana kearah perbaikan dan re-integrasi sehat dengan masyarakat agar terpidana dapat diterima kembali.

² Menurut Dwidja Priyatno (2006:106)

Sistem pembinaan pemasyarakatan dilaksanakan berdasarkan asas: a) Pengayoman. b) Persamaan perlakuan dan pelayanan. c) Pendidikan. d) Pembimbingan. e) Penghormatan harkat dan martabat manusia. f) Kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan. g) Terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu.

Pembinaan warga binaan pemasyarakatan di Lapas dapat dilakukan secara intramural maupun ektramural. Pembinaan secara intramural ini merupakan pembinaan yang dilakukan didalam Lapas, sedangkan pembinaan secara ekstemural merupakan pembinaan diluar Lapas. Pembinaan secara intramural yang dilakukan didalam Lapas disebut asimilasi, yaitu proses pembinaan warga binaan pemasyarakatan yang telah memenuhi persyaratan tertentu dengan membaurkan mereka kedalam kehidupan masyarakat. Sedangkan pembinaan secara ekstemural juga dilakukan oleh lapas yang disebut integrasi yaitu proses pembimbingan warga binaan pemasyarakatan yang telah memenuhi persyaratan tertentu untuk hidup dan berada kembali ditengah-tengah masyarakat dengan bimbingan dan pengawasan Bapas (Widja Priyatno, 2006:108).

¹ Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan

Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan pasal 2 menyebutkan bahwa “program pembinaan dan pembimbingan ditujukan untuk para narapidana dan anak didik pemasyarakatan”. Pendidikan yang diberikan kepada narapidana dan anak didik pemasyarakatan melalui pembinaan dan pembimbingan meliputi kegiatan pembinaan dan pembimbing kepribadian dan kemandirian. Dalam pasal 3 menyebutkan bahwa pembinaan dan pembimbingan kepribadian dan kemandirian sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 meliputi hal-hal yang berkaitan dengan :

- a) Ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa
- b) Kesadaran berbangsa dan bernegara
- c) Intelektual
- d) Sikap dan perilaku
- e) Kesehatan jasmani dan rohani
- f) Kesadaran hukum
- g) Reintegrasi sehat dengan masyarakat
- h) Keterampilan kerja
- i) Latihan kerja dan produksi

2.1.2 ² Pengertian Karakter

Karakter adalah sebagai kumpulan sifat baik yang menjadi perilaku sehari-hari, sebagai perwujudan kesadaran menjalankan peran, fungsi dan tugasnya dalam mengemban amanah dan tanggung jawab (Erie Sudewo 2011:14). Hal ini sejalan dengan pendapat Khan (2010:1) menuliskan “karakter adalah sikap pribadi yang stabil hasil proses konsolidasi secara progresif dan dinamis, integrasi pernyataan dan tindakan” sehingga pendidikan karakter menurut Khan adalah mengajarkan kebiasaan cara berfikir dan berperilaku guna membantu individu untuk hidup dan bekerja bersama sebagai anggota keluarga, masyarakat dan bernegara dan membantu mereka untuk membuat keputusan yang tepat dan dapat dipertanggung jawabkan.

Kemudian disisi lain ¹ deskripsi karakter yang juga dijelaskan oleh

Muchlas Samani dan Hariyanto (2013:41) adalah:

Cara berpikir dan berperilaku yang khas tiap individu untuk hidup dan bekerja sama, baik dalam lingkup keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. Individu yang berkarakter baik adalah individu yang dapat membuat keputusan dan siap mempertanggungjawabkan setiap akibat dari keputusannya. Karakter dapat dianggap sebagai nilai-nilai perilaku manusia yang berhubungan dengan Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, sesama manusia, lingkungan, dan kebangsaan yang terwujud dalam pikiran, sikap, perasaan, perkataan dan perbuatan berdasarkan norma-norma agama, hukum, tata krama, budaya, adat istiadat, dan estetika. Karakter adalah perilaku yang tampak dalam kehidupan sehari-hari baik dalam bersikap maupun dalam bertindak.

Karakter menurut Sigmund Freud dalam Sagala (2013:290) adalah “sekumpulan nilai yang terwujud dalam sistem daya juang dan menjadi landasan pemikiran, sikap dan perilaku seseorang”. Pendapat yang sama dikemukakan oleh Mulyasa (2013:3) “karakter adalah sifat alami seseorang yang merespon situasi secara bermoral dan diwujudkan dalam suatu tindakan nyata melalui perilaku dan nilai-nilai karakter lainnya kepada orang lain”.

Menurut Thomas Lickona dalam Agus Wibowo (2012:32) menyatakan bahwa “karakter merupakan sifat alami dari diri seseorang dalam menangkap suatu keadaan secara bermoral”. Berbeda dengan pendapat di atas, Dharma Kesuma, dkk (2013:11) mendeskripsikan “karakter sebagai suatu nilai yang dilaksanakan dalam bentuk perilaku anak”. Berdasarkan pengertian para ahli di atas mengenai karakter, dapat disimpulkan bahwa karakter merupakan sifat yang melekat dalam diri individu sejak lahir maupun dibentuk oleh lingkungan sekitar.

Sasaran dalam pembinaan karakter di lembaga masyarakat ini adalah tidak lain dari Narapidana itu sendiri. Tujuannya adalah agar narapidana tidak mengulangi lagi perbuatannya dan bisa menemukan kembali kepercayaan dirinya serta dapat diterima menjadi bagian dari anggota masyarakat. Pelaksanaan pendidikan yang dilaksanakan di Lembaga pemasyarakatan, kepala LAPAS dapat bekerjasama dengan instansi pemerintah yang lingkup tugasnya meliputi bidang pendidikan dan

kebudayaan, dan atau badan-badan kemasyarakatan yang bergerak di bidang pendidikan dan pengajaran.

Kemudian sebagaimana dijelaskan pada PP Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan, “dalam pelaksanaan pembinaan perlu dilakukan penggolongan terhadap narapidana di LAPAS”. Menurut Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan Pasal 12 disebutkan bahwa “dalam rangka pembinaan terhadap Narapidana di LAPAS dilakukan penggolongan atas dasar:

- a. Umur
- b. Jenis Kelamin
- c. Lama pidana yang dijatuhkan
- d. Jenis kejahatan
- e. Kriteria lainnya sesuai dengan kebutuhan atau perkembangan pembinaan”.

Pembinaan menurut Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia, pembinaan merupakan proses, cara, usaha dan kegiatan yang dilakukan secara efisien dan efektif untuk memperoleh hasil yang lebih baik. Sedangkan pembimbingan merupakan usaha atau cara untuk memberikan bimbingan.

Melalui penjelasan di atas, disimpulkan bahwa pembinaan karakter merupakan usaha dan kegiatan yang dilakukan individu untuk merubah seseorang atau meningkatkan kualitas pribadi seseorang. Sedangkan untuk pembimbingan merupakan usaha, cara mengarahkan dan memberi dorongan kepada individu.

2.2 ¹Narapidana

Sesuai UU Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, pasal 1 angka ke 7 bahwa narapidana merupakan terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan. Walaupun terpidana kehilangan

kemerdekaannya, tapi ada hak-hak narapidana yang tetap dilindungi dalam sistem pemasyarakatan Indonesia.

Menurut Drs. Ac Sanoesi HAS dalam Sudarto (1986:27) :

Istilah narapidana adalah sebagai pengganti istilah orang hukuman atau orang yang terkena hukuman dengan kata lain istilah narapidana adalah untuk mereka yang telah divonis hakim dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Menurut (Drs. Ac Sanoesi HAS1992, sistem pemasyarakatan Indonesia) :

Istilah narapidana adalah sebagai pengganti istilah orang hukuman atau orang yang terkena hukuman. Dengan kata lain istilah narapidana adalah untuk mereka yang telah divonis hakim dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Warga Binaan Pemasyarakatan adalah Narapidana, Anak Didik Pemasyarakatan, dan Klien Pemasyarakatan.

Pasal 1 ayat 5 UU No. 12 Tahun 1985 tentang pemasyarakatan disebut bahwa “para warga binaan harus dididik, diasuh dibimbing dan diarahkan pada tujuan yang bermanfaat baik untuk diri sendiri dan keluarganya maupun bagi masyarakat setelah pada waktunya dapat kembali kemasyarakat. Adapun warga binaan pemasyarakatan yaitu terdiri atas :

1. Narapidana
2. Orang-orang yang ditahan untuk sementara
3. Orang-orang yang disandera
4. Orang-orang lain yang dimasukkan dengan perintah walaupun tidak menjalani pidana”.

Menurut UU Nomor 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan, seorang narapidana memiliki hak melakukan:

1. Ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya
2. Mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani
3. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran
4. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak
5. Menyampaikan keluhan
6. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa

7. Mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan
8. Menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau lainnya
9. Mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi)
10. Mendapatkan kesempatan cuti mengunjungi keluarga
11. Mendapatkan pembebasan bersyarat
12. Mendapatkan cuti menjelang bebas; dan mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Melalui penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa narapidana adalah orang yang memperoleh hukuman penjara dan kehilangan masa kebebasannya didalam lingkungan masyarakat karena akibat dari pelanggaran hukum yang dilakukannya. Seorang narapidana walaupun tidak dapat hidup bebas ditengah lingkungan masyarakat namun tetap mendapatkan hak-hak dalam dirinya.

2. 2. 1 Kewajiban Narapidana

seorang narapidana yang sedang mengalami suatu hukuman di Lembaga Pemasyarakatan karena telah melakukan suatu tindak pidana mempunyai kewajiban yang harus dilaksanakan, kewajiban dari narapidana ini tercantum pada pasal 23 Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Pemasyarakatan, yakni :

- a) Mengikuti program pembinaan yang meliputi kegiatan perawatan jasmani dan rohani, serta kegiatan tertentu lainnya dengan tertib.
- b) Mengikuti bimbingan dan pendidikan agama sesuai dengan agama dan kepercayaannya.
- c) Mengikuti kegiatan latihan kerja yang dilaksanakan selama 7 (tujuh) jam dalam sehari.
- d) Mematuhi peraturan tata tertib lapas selama mengikuti program kegiatan.
- e) Memelihara sopan santun, bersikap hormat dan berlaku jujur dalam segala perilakunya, baik terhadap sesama penghuni dan lebih khusus terhadap seluruh petugas.
- f) Menjaga keamanan dan ketertiban dalam hubungan interaksi sesama penghuni.

- g) Melaporkan kepada petugas segala permasalahan yang timbul dalam penyelenggaraan pembinaan narapidana, lebih khusus dalam masalah yang dapat memicu terjadinya gangguan kamtib.
- h) Menghindari segala bentuk permusuhan, pertikaian, perkelahian, pencurian, dan pembentukan kelompok-kelompok solidaritas diantara penghuni di dalam lapas.
- i) Menjaga dan memelihara segala barang inventaris yang diterima dan seluruh sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan pembinaan narapidana.
- j) Menjaga kebersihan badan dan lingkungan dalam lapas.

2.3 Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS)

2.3.1 Pengertian Lembaga Pemasyarakatan

Menurut Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan, pengertian lembaga pemasyarakatan diatur pada pasal 1 angka 3 yaitu “lembaga pemasyarakatan yang selanjutnya disebut LAPAS adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan”. Pengertian Sistem Pemasyarakatan menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 adalah “tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan warga binaan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas warga binaan pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab”.

Sebelumnya pemasyarakatan dikenal dengan sistem kepenjaraan atau pidana pencabutan kemerdekaan. Pencabutan kemerdekaan merupakan jenis pidana yang memegang peran penting selama beberapa abad terakhir ini yang lazim disebut pidana penjara. Di Indonesia sistem pemenjaraan baru dikenal pada zaman penjajahan. Pada zaman VOC pun belum dikenal penjara seperti

sekarang, yang ada ialah rumah tahanan yang diperuntukan bagi wanita tunasusila, pengangguran, gelandangan, pemabuk dan sebagainya. Diberikan pula pekerjaan dan pendidikan agama. Tetapi hanya ada di Batavia, terkenal dengan Spinhuis dan Rasphuis.

Pembinaan narapidana di Indonesia secara konstitusional dikenal sejak berlakunya Reglemen Penjara (Gesichten Reglement 1917 Nomor 708) yang dibuat oleh pemerintah kolonial Belanda sebagai realisasi ketentuan pidana penjara yang terkandung dalam Pasal 10 KUHP. Sistem pemenjaraan ini sangat menekankan unsur pembalasan semata terhadap pelaku tindak pidana agar pelaku tindak pidana jera. Kesan pembalasan yang menjiwai peraturan pemenjaraan terlihat dari ketidakjelasan arah dan tujuan yang hendak dicapai dari penjatuhan pidana. Selain itu juga terlihat dari adanya kewajiban narapidana untuk mengikuti pekerjaan baik didalam maupun diluar penjara. Institusi yang digunakan pada sistem pemenjaraan adalah rumah penjara bagi narapidana dan rumah pendidikan negara bagi anak yang bersalah.

2.3.2 Fungsi Lembaga Pemasyarakatan

Sistem peradilan pidana adalah suatu sistem dalam masyarakat untuk mengurangi kejahatan-kejahatan (Mardjono R.1984 Hal.84) sedangkan tujuannya : melakukan resosialisasi dan rehabilitasi pelaku tindak pidana, pengendalian dan pencegahan serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat (Muliadi. 1998 hal.1). Dalam Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. M.02-PK04.10 Tahun 1990 dijelaskan bahwa “tujuan Lapas adalah agar dapat menjadi manusia seutuhnya, memantapkan iman (ketahanan mental) mereka, membina agar mampu berintegrasi secara wajar didalam kehidupan kelompok selama dalam Lembaga Pemasyarakatan dan kehidupan lebih luas (masyarakat) setelah habis masa pidananya”.

Menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan bahwa :

Sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi

manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab.

Selanjutnya dalam Pasal 3 disebutkan bahwa :

Sistem pemasyarakatan berfungsi menyiapkan Warga Binaan Pemasyarakatan agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat, sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab.

¹ Berdasarkan penjelasan di atas mengenai lembaga pemasyarakatan maka dapat diambil kesimpulan bahwa lembaga pemasyarakatan adalah suatu tempat yang digunakan untuk mendidik para narapidana dalam masa tahanan agar narapidana dapat memperbaiki dirinya menjadi lebih baik.

METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan dan Jenis Penelitian

3.1.1 Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan oleh peneliti untuk melakukan penelitian yaitu pendekatan deskriptif dengan metode kualitatif. Pendekatan deskriptif adalah salah satu jenis pendekatan yang tujuannya untuk menyajikan gambaran lengkap mengenai peristiwa atau masalah yang akan di teliti.

Metode penelitian kualitatif menurut Saryono (2010):

Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang digunakan untuk menyelidiki, menemukan, menggambarkan, dan menjelaskan kualitas atau keistimewaan dari pengaruh sosial yang tidak dapat dijelaskan, diukur, atau digambarkan melalui pendekatan kuantitatif.

Alasan digunakan metode kualitatif karena dalam penelitian ini peneliti hendak menggambarkan Implementasi Pembinaan Karakter Bagi Narapidana Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Kota Gunungsitoli secara nyata. Sedangkan pendekatan deskriptif adalah suatu pendekatan yang menjelaskan atau mendeskripsikan tentang kondisi atau keadaan suatu objek. Dengan menggunakan pendekatan ini data dapat diperoleh lebih lengkap untuk tercapainya tujuan dan jawaban atas pertanyaan penelitian.

3.1.2 Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini jenis penelitian yang digunakan adalah interaktif (saling berhubungan), dan partisipatoris (keikutsertaan) serta memahami cara hidup dari pandangan orang yang terlibat di dalamnya. Menurut Bogdan dan Taylor (dalam Lexy J. Moleong, 2013:04) mendefenisikan “penelitian kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati”.

3.2 Variabel Penelitian

Variabel penelitian adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, objek, atau kegiatan yang mempunyai variabel tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2014). Variabel – variabel yang digunakan dalam penelitian ini diklasifikasikan sebagai berikut :

- a. Variabel independen atau disebut variabel bebas merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen (terikat). Yang menjadi variabel bebas dalam penelitian ini meliputi Pembinaan Karakter Bagi Narapidana.
- b. Variabel dependen atau disebut variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas yang menjadi variabel terikat dalam penelitian ini adalah Narapidana dan Petugas Lembaga Pemasyarakatan.

⁵ 3.3 Lokasi dan Jadwal Penelitian

3.3.1 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang dipilih oleh peneliti adalah ⁴ di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Kota Gunungsitoli yang terletak di Jalan Dolok Martimbang No. 19 Desa Hilinaa, Kecamatan Gunungsitoli, Kota Gunungsitoli, Sumatera Utara. Alasan peneliti memilih Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Kota Gunungsitoli sebagai lokasi penelitian ⁵ adalah:

- a. Jarak lokasi penelitian mudah dijangkau oleh peneliti.
- b. Peneliti berkeyakinan ⁵ bahwa di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Kota Gunungsitoli layak untuk dilakukan penelitian dan tentunya akan menjawab permasalahan yang diteliti.

instrumen sekaligus pengumpul data. Instrumen selain manusia (seperti; angket, pedoman wawancara, pedoman observasi dan sebagainya) dapat pula digunakan, tetapi fungsinya terbatas sebagai pendukung tugas peneliti sebagai instrumen kunci. Oleh karena itu dalam penelitian kualitatif kehadiran peneliti adalah mutlak, karena peneliti harus berinteraksi dengan lingkungan baik manusia. Kehadirannya di lapangan peneliti harus dijelaskan, apakah kehadirannya diketahui atau tidak diketahui oleh subyek penelitian. Ini berkaitan dengan keterlibatan peneliti dalam kancha penelitian, apakah terlibat aktif atau pasif (Murni, 2017).

Dalam penelitian kualitatif, alat atau instrumen utama pengumpulan data adalah manusia atau peneliti itu sendiri dengan cara mengamati, bertanya, mendengar, meminta dan mengambil data penelitian. Peneliti harus mendapatkan data yang valid sehingga tidak sembarang narasumber yang diwawancarai. Oleh karena itu, kondisi informan pun harus jelas sesuai dengan kebutuhan data agar dapat diakui kebenaran datanya.

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi.

a) Teknik Observasi

Observasi adalah proses pemerolehan data dari tangan pertama, dengan cara melakukan pengamatan orang serta lokasi dilakukannya penelitian. Dalam hal ini fokus penelitian yang diteliti adalah Implementasi Pembinaan Karakter Bagi Narapidana Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Kota Gunungsitoli. Untuk observasi yang dilakukan peneliti adalah memperoleh data tersebut dengan cara pengamatan langsung.

b) Teknik Wawancara

Wawancara merupakan salah satu bentuk teknik pengumpulan data dengan cara bertanya kepada informan terkait dengan pokok permasalahan. Menurut Sugiyono (2016:317) “wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang digunakan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam.”. Dalam

penelitian ini, peneliti menggunakan wawancara terstruktur dan secara mendalam yang diharapkan dapat menggali lebih lengkap informasi yang disampaikan oleh informan. Wawancara dalam penelitian ini tentunya dilakukan dengan menggunakan pedoman wawancara yang memuat garis besar pokok-pokok permasalahan yang akan ditanyakan.

c) Teknik Dokumentasi

Dokumentasi di sini adalah metode yang digunakan untuk mendapatkan data tambahan atau data pendukung melalui dokumen-dokumen yang ada kaitannya dengan penelitian. Dokumentasi sendiri adalah teknik yang digunakan untuk mendapatkan data dengan cara mempelajari, mencatat arsip atau data yang ada kaitannya dengan masalah yang akan diteliti sebagai bahan menganalisis permasalahan.

Menurut Sugiyono (2016: 329):

Dokumentasi adalah suatu cara yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi dalam bentuk buku, arsip, dokumen, tulisan angka dan gambar yang berupa laporan serta keterangan yang dapat mendukung penelitian.

Dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data kemudian ditelaah.

Dokumen tersebut dapat berupa tulisan maupun gambar yang terkait dengan penelitian. Alat yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data adalah rekaman, hasil gambar, dan catatan lapangan. Rekaman dengan menggunakan alat perekam, HP (merekam semua pembicaraan), hasil gambar sebagai bukti nyata, kemudian buku catatan yang berfungsi untuk mencatat semua percakapan dengan sumber data.

Teknik pengumpulan data yang dimaksud bila digambarkan sebagai berikut:

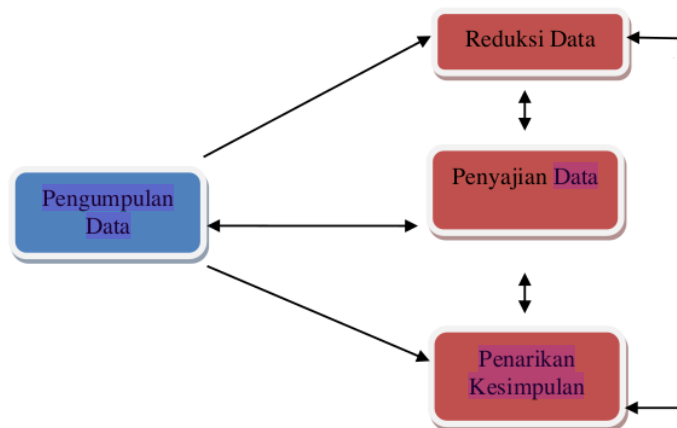


Gambar 1. Bagan Teknik Pengumpulan Data

3.7 Teknik Analisis Data

Untuk melakukan penelitian, teknik analisis data yang digunakan oleh peneliti adalah analisis data kualitatif, dengan menggunakan analisis data hasil observasi awal atau data sekunder. Karena peneliti masih belum melakukan penelitian secara mendalam di lapangan. Jika nanti peneliti akan melakukan penelitian di lapangan maka akan digunakan analisis domain. Miles and Huberman (2016) mengemukakan bahwa “Aktifitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara terus menerus pada setiap tahapan penelitian sehingga sampai tuntas, dan datanya sampai jenuh”.

Adapun secara skematis empat tahapan dalam analisis data yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 2. Analisis Data Interaktif Miles dan Huberman

1. Pengumpulan Data

Data yang diperoleh dari hasil pengamatan (observasi), wawancara, dan dokumentasi dicatat dalam catatan lapangan yang terdiri dari dua aspek yakni deskripsi dan refleksi. Catatan deskripsi merupakan data alami yang berisi apa yang dilihat, didengar, dirasakan, disaksikan, dan dialami sendiri oleh peneliti tentang fenomena yang dijumpai, sedangkan catatan refleksi adalah catatan yang memuat kesan, komentar, tafsiran peneliti tentang temuan yang dijumpai dan merupakan bahan rencana pengumpulan data untuk tahap selanjutnya. Guna mendapatkan catatan ini maka peneliti melakukan observasi dan

wawancara terhadap beberapa informan.

2. Reduksi Data

Reduksi data merupakan proses seleksi, pemfokusan, penyederhanaan, dan abstraksi data yang masih kasar yang diperoleh di lapangan. Reduksi data dilakukan selama penelitian berlangsung, selama penelitian di lapangan, sampai laporan tersusun. Reduksi data merupakan bagian dari analisis data dengan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang data yang tidak diperlukan, dan mengorganisasi data sehingga kesimpulan final dapat diambil dan diverifikasi.

3. Penyajian Data

Data dan informasi yang didapat di lapangan disajikan sesuai dengan data yang diperoleh dalam penelitian di lapangan sehingga peneliti akan dapat menguasai data dan tidak salah dalam menganalisis data serta menarik kesimpulan. Penyajian data bertujuan untuk menyederhanakan informasi yang kompleks menjadi data yang sederhana sehingga lebih mudah untuk dipahami.

4. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan adalah usaha untuk mencari atau memahami makna, keteraturan pola kejelasan, dan alur sebab akibat atau proporsisi. Kesimpulan yang ditarik segera diverifikasi dengan cara melihat dan mempertanyakan kembali sambil melihat catatan agar memperoleh pemahaman yang lebih tepat.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Paparan Data

4.1.1 Lokasi dan Keadaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Kota

Gunungsitoli

⁴ Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Kota Gunungsitoli awalnya bernama rumah penjara di bawah naungan Direktorat Jawatan Kependidikan Departemen Kehakiman Republik Indonesia. Sejalan dengan perkembangan zaman dengan dibentuknya Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Tahun 1964 berubah nama dengan sebutan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) Kelas II B Gunungsitoli, institusi ini awalnya dibangun oleh pemerintah kolonial belanda pada tahun 1925, difungsikan sebagai penjara bagi masyarakat pribumi yang melakukan kejahatan atau perlawanan bagi pemerintahan kolonial belanda pada masa itu.

Lokasi Rutan Kelas II B Gunungsitoli berada di jalan Soekarno Kota Gunungsitoli, hingga pada tahun 1992 Rutan Kelas II B Gunungsitoli berpindah alamat ke Jalan Dolok Martimbang NO.19 Desa Hilina'a Kecamatan Gunungsitoli dan diresmikan ⁴ oleh Kepala Kantor Wilayah Kehakiman Sumatera Utara Sofumbowo Larosa, S.H. Perubahan nomenklatur organisasi dari Rutan Kelas II B Gunungsitoli berubah menjadi Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) Kelas II B Kota Gunungsitoli pada tahun ⁴ 2007 yang dipimpin oleh Bapak Soetopo Barutu, A.Md.IP., S.Sos., M.Si.

Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Kota Gunungsitoli saat ini berada di Jalan Dolok Martimbang No 26 a Hilina'a Kecamatan Gunungsitoli, Sumatera Utara. Dengan luas 7.500 M2.

4.1.2 Visi dan Misi

Dalam upaya untuk mencapai pelayanan yang maksimal sehingga mampu untuk memberikan kepuasan terhadap masyarakat. Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Kota Gunungsitoli memiliki visi dan misi sebagai berikut :

Visi :

Masyarakat Memperoleh Kepastian Hukum

Misi :

1. Mewujudkan peraturan perundang-undangan yang berkualitas
2. Mewujudkan pelayanan hukum yang berkualitas
3. Mewujudkan penegakan hukum yang berkualitas

4.1.3 Daftar Urut Jabatan/Kepangkatan Pegawai, Warga Binaan dan Sarana Prasarana Pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Kota Gunungsitoli Tahun 2023

Tabel I

NO	N A M A	N I P	J A B A T A N
01	EFFENDI YULIANTO ,Bc..I.P.,S.Sos.,S.H.,M.Si	196707211992031001	KALAPAS
02	BOROZATULO GEA, SH	19680719 1992031 001	KASUBBAG TU
03	FAJARIMAN LASE, SH	19681226 1990031 002	KA.KPLP
04	YOSUA ZEBUA, SE	19720406 1992031 002	Ka. Seksi Binadik dan Giatja
05	AFERELI ZILIWU, SH.	19660316 1989031 001	KA. ADM KAMTIB
06	KHAERUMAN PILIANG, S.H	19670409 1989031 002	Kaur Umum
07	LIESLIN MARUHAWA, S.Kep	19851107 2011012 001	K.Kepegawaian dan Keu.
08	ERMIN POLEM	197207211992031002	Kasubsi Pelaporan
09	ZULMAN HULU	196912211994031001	Kasubsi Keamanan

10	MANGENANO NAZARA	19671007 199003 1001	Kasubsi Kegiatan Kerja
11	ILMAN KARYANUS ZEBUA, SKM	19800606 2014021 001	Kasubsi Perawatan Napi/Tah
12	NATAL FISMAN ZEBUA, S.H	19911226 2012121 001	Kasubsi Registrasi dan Giatja
13	Drg.JENNI RAJANI MANIK	19691210 200212 2003	Dokter Gigi Madya (JFT)
14	RITA HAREFA,SST	19710722199103 2 002	Perawat Penyelia (JFT)
15	IMELDA LAOWO,AMK	19850618 2008042 001	Perawat Penyelia (JFT)
16	KESAN RIA TELAUMBANUA,AMd	198405222010012026	Pengolah Data Kesehatan
17	BERTHA MUTIARA SARI ZEBUA, A.M.Keb	198904262011012005	Pengadministrasi Umum
18	ROTUA MASDIANA BANCIN, A.Md	197512081998032005	Perawat (JFT)
19	MARTILINA HAREFA	19660318 1993032 001	P.PEMBINAAN ROHANIAN
20	YULIUS HULU	196807061994031001	Anggota Jaga
21	ERLENTINA HAREFA,AMK	198606212009032010	Anggota Jaga
22	FEBRIANTI KRISTINA, SKM	19820227 200605 2 001	Anggota Jaga
23	TRIMARIANG HAREFA, AMKG	19870807 201001 2 038	P.Layanan Kunjungan
24	FERIAMAN HAREFA,A.M.K.L.,S.K.M	19810416 201101 1 003	KARUPAM
25	YUSLIAN HAREFA, SKM	19740506 200605 2 001	Bidan Pelaksana Lanjutan

26	RETNOWATI,A.Md	19800419 201001 2 0 21	P.PEMBINAAN KEROHANIAN
27	ASNARIA ZEGA	19660721199003 2 002	Bendahara Penerima
28	VITALIS DIAN LESTARI ZEBUA	19810802 20021 2 1 002	P. HASIL KERJA
29	HELMI SUPRIANDI TELAUMBANUA, S.H	19900813 200912 1 002	KARUPAM
30	AFOLO MENDROFA,AMK	19760907201001 1 011	KARUPAM
31	HERLY KURNIAWATI TELAUMBANUA	19840520 2008012 001	P.DATLAPORAN KEAMANAN
32	EMANUEL HAREFA	19800526 200701 1 001	KARUPAM
33	DERMAWAN HAREFA	19750824 200605 1 001	P. SARANA KERJA
34	MILATINA CASUARINA KUTTY	1990012 3 200912 2 002	Satuan Pengamanan/Tahanan
35	ABADI VIVIT PUTRA HAREFA	19960302 201712 1 003	Bendahara Pengeluaran
36	APELES AGUS SAPUTRA MENDROFA	19890828 201712 1 002	Penjaga Tahanan
37	VERTU KHARIS HARAPAN PUTRA ZEGA	19900224 201712 1 004	Penjaga Tahanan
38	SOLI SHARON TELAUMBANUA	19900501 201712 1 001	Penjaga Tahanan
39	SENIMAN JAYA TELAUMBANUA	19900916 201712 1 003	Penjaga Tahanan
40	MEI KARIANUS ZAI	19910517201712 1 004	Penjaga Tahanan
41	FOERAERA TELAUMBANUA	19911021 2017121 001	Penjaga Tahanan
42	EL SETIA ZENDRATO	19920428 201712 1	Pengadministrasi

		007	Keuangan
43	EKARISMAN HAREFA	19920620201712 1 002	Penjaga Tahanan
44	DARIUS SOWAA GEA	19930421 201712 1 002	Penjaga Tahanan
45	OKTORIS NAZARA	19931009 201712 1 011	Penjaga Tahanan
46	DIONISIUS PETRO HIA	19940513 201712 1 003	P.Layanan Kunjungan
47	SETIA HARAPAN HAREFA	19940731 201712 1 004	Penjaga Tahanan
48	IKHTIAR ZALUKHU	19950801 201712 1 004	Penjaga Tahanan
49	RISVAN NOTATEMA HAREFA	19951030 201712 1 005	P. Data Kegiatan Keamanan
50	AURELIA IDEAL ZEGA	19951024 201712 1 004	P. dan Pengelola Makanan
51	TEGUH JAYA TELAUMBANUA	19960509 201712 1 005	Pengadministrasi Umum
52	KHALIS INDRAWAN ZEBUA	19961205 201712 1 003	Pengolah Data Sidik Jari
53	HISKIA ZEGA	199612272017121005	P.Layanan Kunjungan
54	FERDINAN CARLOS ZENDRATO	19970816 201712 1 004	Penjaga Tahanan
55	ARIS ANUGERAH WARUWU	19970402 201712 1 001	Penjaga Tahanan
56	FANOI IMAN KRISTIAN TELAUMBANUA	19980205 201712 1 003	Penjaga Tahanan
57	KHASIAT IMAN AFORE HONDRO	19980416 201712 1 003	Penjaga Tahanan

58	STATESMAN ALFAGUNA HULU	199805212017121004	Penjaga Tahanan
59	ASJAN ANUGERAH ZAI	19970102 202012 1 001	Penjaga Tahanan
60	JOSES JOELI SAMAHEA LAWOLO	20001112 202012 1 001	Penjaga Tahanan
61	WASPADA ZAI	199607072022031001	Penjaga Tahanan
62	ADI RAHMAT IVOLALA GEA	200105312022031002	Penjaga Tahanan
63	ELEAZARO ZILIWU	200202272022031002	Penjaga Tahanan
64	JUANDI GEA	200206022022031001	Penjaga Tahanan
65	KRYE ELEISON SANOTONA ZEGA	200208072022031003	Penjaga Tahanan
66	IGA ENNOLERIAN LASE	200211042022032001	Penjaga Tahanan (Wanita)
67	PRISKA CINDY CAHYA NINGSIH GEA	200301092022032001	Penjaga Tahanan (Wanita)

KETERANGAN

REKAPITULASI GOLONGAN :

REKAPITULASI PENDIDIKAN :

		1. Strata-2	: 01 ORANG	
1. GOLONGAN :	IV	: 02 ORANG	2. Strata-1	: 13 ORANG
2. GOLONGAN :	III	: 29 ORANG	3. SLTA	: 46 ORANG
3. GOLONGAN :	II	: 36 ORANG	4. DIII	: 07 ORANG
4. GOLONGAN :	I	: - ORANG	5. SLTP	: - ORANG
JUMLAH	: 67 ORANG	JUMLAH	: 67 ORANG	
KETERANGAN	: 03 ORANG (DETASER)			
LAKI-LAKI	: 49 ORANG			
PEREMPUAN	: 18 ORANG			

Tabel II Jumlah Warga Binaan

NO.	WARGA BINAAN	JUMLAH
1.	TAHANAN	29 ORANG
2.	NARAPIDANA	208 ORANG
		237 ORANG

KETERANGAN : TAHANAN : A. LAKI-LAKI : 28

B. PEREMPUAN : 1

NARAPIDANA : A. LAKI-LAKI : 194

B. PEREMPUAN : 10

C. ANAK-ANAK : 4

**Tabel III Sarana Dan Prasarana Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Kota
Gunungsitoli**

NO	RUANGAN	JUMLAH
1.	RUANGAN TATA USAHA	1
2.	KAUR KEPEGAWAIAN	1
3.	KEUANGAN	1
4.	KEPALA URUSAN UMUM	1
5.	KASI ADMINISTRASI KAMTIM	1
6.	RUANGAN KAMTIM	1
7.	RUANGAN SEKSI BINAKDI	1
8.	SEKSI KEPERAWATAN	1
9.	KLINIK	1
10.	POS JAGA	4

11.	BLOK BWP	4
12.	POS MENARA	4
13.	GEREJA	1
14.	MASJID	1
15.	AULA	1
16.	RUANGAN KETERAMPILAN	3

4.2 Hasil Penelitian

Selama peneliti berada dilokasi penelitian yakni Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Kota Gunungsitoli, peneliti mengumpulkan data dari beberapa informan. Adapun ¹ Implementasi pendidikan karakter bagi warga binaan sebagai berikut:

¹ 1. Implementasi Pendidikan Karakter Bagi Warga Binaan Pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Kota Gunungsitoli.

Proses implementasi pendidikan karakter ¹ merupakan proses kebijakan yang penting. Kebijakan yang telah dirumuskan tidak ada gunanya apabila tidak diimplementasikan. Implementasi pendidikan karakter di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Kota Gunungsitoli dilakukan melalui 2 proses pembinaan pemasyarakatan, yaitu pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Y.Z (kepala seksi Binadik Dan Giatja) didapat data bahwa 2 proses pembinaan warga binaan, yaitu:

“Dari tahun ketahun lembaga pemasyarakatan kelas II B kota gunungsitoli selalu memberikan pendidikan karakter bagi warga binaan melalui pembimbingan dan pembinaan yang dilakukan oleh petugas pemasyarakatan. Proses pembinaan ini dilakukan

dengan 2 proses, yaitu pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian. Pembinaan kepribadian ini tertuju pada sifat dan perilaku warga binaan seperti karakter warga binaan, setiap saat kami pihak lapas selalu berusaha menanamkan nilai-nilai karakter pada mereka. Biasa kita melakukan pendekatan secara perorangan agar mereka dapat berubah dan berada di jalan yang benar.

Kemudian dalam proses pembinaan kemandirian ini, warga binaan dituntun untuk selalu mengerjakan kegiatan atau program apapun di lembaga pemasyarakatan, supaya mereka bisa mandiri dan selalu tidak bergantung pada sesama warga binaan. Kemudian mereka juga dilatih dan dituntun supaya selalu disiplin, baik itu disiplin waktu dan sebagainya. ” (Wawancara, Senin 31 Juli 2023).

Pernyataan Bapak Y.Z tentang pendidikan karakter yang dilakukan lembaga pemasyarakatan melalui proses pembinaan di dukung dengan pernyataan yang sama oleh Bapak A.G, yaitu :

“Memang betul yang disampaikan oleh Bapak Y.Z, bahwa lembaga pemasyarakatan sampai saat ini masih menjalankan kebijakan atau kegiatan pendidikan karakter bagi warga binaan melalui pembimbingan dan pembinaan. Karena warga binaan yang masuk di lembaga pemasyarakatan ini memiliki kasus yang berbeda-beda, maka pihak lembaga pemasyarakatan melakukan pendidikan karakter melalui 2 proses pembinaan, yaitu pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian.” (Wawancara, Senin 31 Juli 2023).

Dari pemaparan dua pendapat di atas memang benar adanya. Ini dapat dibuktikan pada saat peneliti mengadakan penelitian langsung di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Kota Gunungsitoli pada tanggal 31 Juli 2023 terdapat warga binaan yang sedang melakukan kegiatan seperti ibadah pagi, kegiatan kemandirian dan ada juga yang berolahraga. Tanggal 31 Juli 2023, peneliti mendapati petugas parkir Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Kota Gunungsitoli adalah seorang narapidana.

Pendidikan karakter melalui kebijakan pembinaan dan pembimbingan merupakan sarana untuk memperbaiki kepribadian narapidana. Pendidikan karakter dibutuhkan di dalam hal ini. Pendidikan karakter di Lembaga

Pemasyarakatan Kelas II B Kota Gunungsitoli dituangkan di dalam kebijakan pembinaan dan pembimbingan. Sebagaimana yang dipaparkan oleh Bapak Y.Z selaku Kepala seksi BINADIK dan GIATJA, yaitu :

“Semua kegiatan disini wujud dari pembentukan karakter warga binaan. Dari pembinaan yang mereka dapat, kami pihak lapas selalu berusaha menanamkan nilai-nilai karakter pada mereka. Biasa kita melakukan pendekatan secara perorangan agar mereka dapat berubah dan berada di jalan yang benar”. (Wawancara, Senin 31 Juli 2023).

Hal serupa juga disampaikan oleh Bapak A.G selaku petugas pemasyarakatan sebagai berikut:

“Semua kegiatan yang diselenggarakan dalam mendukung terselenggaranya kebijakan pembinaan dan pembimbingan bertujuan untuk memperbaiki kepribadian mereka (narapidana). Karakter merupakan kepribadian pula. Sehingga pembinaan dan pembimbingan ini adalah bentuk pembelajaran dalam membentuk, membangun karakter dan kepribadian mereka. Kembali lagi pada apa tujuan yang hendak dicapai dari adanya pembinaan dan pembimbingan ini. Jadi harapan Lapas sendiri, narapidana dapat keluar dari tempat ini dengan kepribadian yang baru dan baik, jangan sampai malah tambah buruk”. (Wawancara Senin 31 Juli 2023).

Dari kedua pendapat dari informan di atas, dapat disimpulkan bahwa pendidikan karakter diberikan kepada narapidana melalui kebijakan pembinaan dan pembimbingan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Kota Gunungsitoli. Kebijakan pembinaan dan pembimbingan digunakan sebagai sarana memperbaiki kepribadian narapidana dengan cara menanamkan nilai-nilai karakter ke dalam diri narapidana.

Implementasi kebijakan pembinaan dan pembimbingan dituangkan di dalam beberapa program kegiatan. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Y.Z

(kepala seksi BINADIK dan GIATJA), yaitu :

“Dalam melakukan pendidikan karakter bagi warga binaan kami pihak lembaga pemasyarakatan memberlakukan beberapa kegiatan, seperti ketaqwaan terhadap Tuhan yang Maha Esa. Melalui pendidikan rohani, pendidikan agama, dan langkah-langkah yang kami laksanakan ini selalu menjalin kerjasama dengan kementerian agama, lembaga-lembaga gereja. dan ini didukung dengan adanya sarana dan prasarana yang ada, seperti tersedianya rumah ibadah dan juga rohaniawan dan penyuluh keagamaan juga ada. Kemudian kegiatan lain adalah kesadaran berbangsa dan bernegara, kami selalu memberikan pemahaman itu kepada warga binaan melalui upacara-upacara penaikan bendera yang dilaksanakan setiap hari senin dan juga pelaksanaan apel pagi. Kemudian ada juga kegiatan perubahan sikap dan perilaku, yaaa...kita selalu memberikan itu dengan menyediakan buku-buku yang berkaitan tentang psikolog dan di dukung juga oleh adanya perpustakaan, dan pendidikan keagamaan. Dan juga ada kegiatan mengasah keterampilan warga binaan seperti ada kegiatan kerajinan tangan dan keterampilan lain. Sehingga harapan kami semoga warga binaan ini ketika selesai menjalani masa tahanan dan bisa kembali ke tengah masyarakatan dapat diterima kembali dan juga mendapat perubahan sikap dan perilaku, serta mempunyai keterampilan tersendiri.”(Wawancara Senin 31 Juli 2023).

Pernyataan tersebut diatas juga di sama persis yang disampaikan oleh Bapak E.W (warga binaan), yaitu :

“Kami warga binaan yang ada disini sering melakukan kegiatan-kegiatan yang membentuk kepribadian kami dan juga menyadari kesalahan yang telah menjerumuskan kami bisa masuk disini. Kami selalu melakukan kegiatan rohani, upacara, apel pagi dan juga kegiatan-kegiatan positif lainnya.”(Wawancara Senin 31 Juli 2023).

Dari kedua pernyataan tersebut diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa memang benar ada program atau kegiatan yang dilakukan oleh lembaga pemasyarakatan terhadap warga binaan dalam membentuk karakter dan kepribadian warga binaan, sehingga ketika warga binaan telah selesai menjalani masa tahanan maka dapat kembali ke tengah masyarakat dengan memiliki perubahan kepribadian dan memiliki keterampilan dalam bekerja. Kemudian Kebijakan pembinaan dan pembimbingan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Kota Gunungsitoli di bagi menjadi dua, yaitu

pembinaan dan pembimbingan kepribadian dan pembinaan dan pembimbingan kemandirian. Pembinaan dan pembimbingan kepribadian di bagi menjadi tiga, yaitu pembinaan dan pembimbingan intelektual, jasmani dan rohani. Pembinaan dan pembimbingan kemandirian di bagi menjadi tiga, diantaranya adalah pembinaan dan pembimbingan kemandirian, pelatihan dan kegiatan kerja. Dalam menyelenggarakan kegiatan tersebut, petugas pemasyarakatan berusaha menumbuhkan nilai-nilai karakter yang berguna untuk narapidana.

2. Kendala Yang Dihadapi Petugas Pemasyarakatan Dalam melaksanakan Pendidikan Karakter Bagi Warga Binaan Pada lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Kota gunungsitoli.

“Kendala ⁷ berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata kendala dapat diartikan sebagai halangan atau rintangan yang dialami” (Badudun-Zain, 1994:489). Pada penelitian ini yang menjadi kendala dalam implementasi pendidikan karakter bagi warga binaan adalah warga binaan itu sendiri dan sarana prasarana yang kurang mendukung.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada Bapak Y.Z (Kepala seksi BINADIK dan GIATJA) tentang kendala yang dialami oleh petugas pemasyarakatan, yaitu:

“Yaaa... memang setiap pelaksanaan kegiatan itu pasti ada hambatan ataupun kendala yang dialami, kegiatan apapun itu pasti ada. Nah, di lembaga pemasyarakatan ini petugasnya dalam melaksanakan kegiatan pendidikan karakter melalui pembinaan dan pembimbingan mengalami kendala di lapangan, misalnya, karakter warga binaan. Mulai sebelum masuk di lembaga pemasyarakatan, warga binaan ini mempunyai karakter yang bisa dikatakan buruk, jadi susah untuk diarahkan. Walaupun dilakukan pembinaan dan pendekatan sewaktu-waktu akan kembali lagi pada karakter tersebut. sehingga mau tidak mau petugas pemasyarakatan tegas dalam hal melakukan pembinaan.

Kemudian kita juga disini tidak ada petugas yang

mempunyai basic untuk pendidikan karakter bagi warga binaan, yaa setidaknya kan petugas yang pendidikannya mempunyai keahlian dalam psikolog, karena masyarakat yang masuk dalam lembaga pemasyarakatan ini berasal dari berbagai macam kasus tindak pidana, yaaa muda-mudah kedepan ada petugas yang ahli dalam hal tersebut. Kemudian kendala lain adalah ketidakterediaan ruangan yang khusus untuk pembinaan karakter warga binaan seperti ruangan konseling, apalagi sarana dan prasarana yang masih belum lengkap.” (Wawancara Senin 31 Juli 2023).

Pernyataan diatas juga di dukung oleh Bapak A.G (petugas pemasyarakatan), yaitu :

“Saya sebagai petugas pemasyarakatan yang setiap saat melaksanakan tugas sebagai pendidik warga binaan tentunya banyak dan bermacam-macam kendala yang saya hadapi, misalnya ketika ada warga binaan yang karakternya memang sudah buruk dari lingkungan masyarakat dia berada dan terbawa-bawa di lembaga pemasyarakatan. Saya sebagai petugas selalu mengarahkan dan memberikan pembinaan sesuai dengan program atau kegiatan dan bahkan melakukan pendekatan secara perorangan, tetapi sewaktu-waktu akan berubah lagi dan kembali lagi ke karakter awalnya. Kemudian kendala lain adalah sarana dan prasarana yang kurang memadai dan lengkap yang memang bisa digunakan oleh petugas dan bahkan warga binaan ketika melakukan aktivitas atau kegiatan dalam pendidikan karakter ini. (Wawancara Senin 31 Juli 2023).

Dalam melakukan pendidikan karakter bagi warga binaan melalui pembimbingan dan pembinaan ini bukan hanya petugas pemasyarakatan yang mengalami hambatan ataupun kendala. Ada juga warga binaan yang memang mengakui ada kendala yang dialaminya ketika mengikuti kegiatan-kegiatan yang searah dalam pendidikan karakter ini.

Berdasarkan hasil Wawancara yang dilakukan peneliti kepada Bapak E.W (warga binaan), yaitu :

“saya akui memang pendidikan karakter yang dilakukan oleh petugas pemasyarakatan kepada kami warga binaan sudah cukup baik, tetapi dibalik itu ada juga kelemahan yang dialami oleh petugas maupun warga binaan. Kadang saya malas dalam mengikuti kegiatan

tersebut karena karena sarana dan prasarana yang kami gunakan kurang mendukung, kemudian kegiatan pendidikan karakter kurang stabil karena tidak ada tempat khusus untuk melakukan pembinaan bagi warga binaan yang memiliki karakter yang bisa dikatakan buruk”

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Y.Z, Bapak A.G dan Bapak E.W(warga binaan), dapat diambil kesimpulan bahwa kendala dari implementasi pendidikan karakter bagi warga binaan melalui kebijakan pembinaan dan pembimbingan adalah karakter warga binaan dan sarana dan prasarana yang kurang memenuhi. Pihak lapas harus dapat melaksanakan pembinaan dan pembimbingan. Padahal, kegiatan yang diselenggarakan pihak lapas bervariasi dan banyak. Dengan adanya banyak kegiatan tentu membutuhkan peralatan yang banyak pula. Namun pada kenyataannya, di Lembaga Pemasyarakatan masih terdapat kendala berupa kurangnya peralatan untuk melakukan kerja. Sehingga kegiatan yang dilakukan kurang stabil atau kurang berjalan dengan baik.

3. Upaya Yang Dilakukan Petugas Pemasyarakatan Dalam Mengatasi Kendala Implementasi Pendidikan Karakter Bagi Warga Binaan Pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Kota Gunungsitoli.

Dengan berbagai macam kendala yang dialami, solusi dibutuhkan untuk mengatasi kendala yang ada. Sebelumnya terdapat beberapa pemaparan mengenai kendala yang ada, selanjutnya ada beberapa solusi yang dipaparkan oleh Bapak Y.Z, yaitu:

”Tentu untuk melaksanakan kegiatan ini walaupun tadi berbagai kendalanya tentu ada juga upaya-upaya kami sebagai petugas pemasyarakatan. Warga binaan yang memiliki karakter yang susah untuk diarahakan tentunya kami melaksanakan pendekatan secara persuasif kepada warga binaan. Yaaa... sehingga pendekatan secara persuasif ini atau komunikasi secara pribadi ini lebih kami

tekanan kepada warga binaan sehingga mereka juga dapat menceritakan atau curhat dengan kami tentang apa yang dirasakan atau dialaminya, beban psikologi yang mereka hadapi dapat disampaikan kepada kami sehingga kami juga tahu untuk mengatasi hal tersebut. Kemudian tentang petugas pemasyarakatan yang ahli dalam psikolog atau yang bisa mengetahui tentang karakter. Yaaaa... kami selalu menunggu semoga kedepan ini atau tahun ini ada petugas yang ditempatkan disini yang latar belakangnya memang ahli dalam psikolog.

Kemudian untuk sarana dan prasarana, memang kami selalu mengajukan permohonan proposal kepada atasan untuk memberikan solusi yang baik dengan melengkapi sarana dan prasarana atau alat-alat yang digunakan oleh petugas dan warga binaan dalam melakukan kegiatan pembinaan ini, sehingga tidak ada lagi kendala. Jadi semoga tahun ini dapat dipenuhi dan diatasi apa saja yang menjadi hambatan tersebut.” (Wawancara Senin 31 Juli 2023).

Pernyataan tersebut juga diatas di dukung penuh oleh Bapak A.G (Petugas Pemasyarakatan), yaitu :

“Agar berhasil dalam melaksanakan pembinaan dan pembimbingan, petugas lapas akan memberikan Reward kepada para narapidana yang menaati segala bentuk aturan yang berlaku. Adapun bentuk dari Reward itu sendiri adalah cuti bersyarat, remisi, bebas bersyarat, cuti mengunjungi keluarga dan segala bentuk cuti lainnya. Sedangkan untuk narapidana yang melanggar aturan akan dikenakan sanksi bagi pelakunya. Adapun sanksi tersebut adalah tidak diusulkan memperoleh remisi, cuti dan bebas. Kemudian kami memberikan motivasi-motivasi yang dapat membangun hati nurani mereka dan memberikan pandangan yang baik kepada mereka, menjelaskan apa saja keuntungan yang akan di dapat dari menjalankan pembinaan ini. Kemudian melakukan pengajuan proposal untuk menambah sarana dan prasarana yang kurang guna menambah peralatan yang kurang guna mendukung pelaksanaan pembinaan dan pembimbingan. Memberikan motivasi melalui pendekatan individu kepada para narapidana”. (Wawancara Senin 31 Juli 2023).

¹ Berdasarkan pendapat yang dikemukakan oleh Bapak Y.Z Bapak A.G, dapat diambil kesimpulan bahwa solusi yang diberikan untuk mengatasi hambatan yang terjadi adalah melakukan pendekatan secara persuasif kepada warga binaan atau komunikasi secara perorangan agar apa yang dialami oleh warga binaan dapat diberikan solusi oleh petugas pemasyarakatan. Kemudian pemberian hadiah

berupa reward yang berwujud cuti bersyarat, remisi, bebas bersyarat, cuti mengunjung keluarga. Seperti yang telah dipaparkan di bagian sebelumnya, kebijakan pembinaan dan pembimbingan dapat dijadikan jembatan untuk bisa mendapatkan remisi maupun pembebasan. Dengan mensosialisasikan keuntungan narapidana melaksanakan kebijakan pembinaan dan pembimbingan maka narapidana akan tergugah melaksanakan kebijakan tersebut. Selain itu, solusi yang dilakukan adalah dengan membuat proposal pengajuan penambahan barang ataupun sarana prasarana yang masih kurang.

4.3 Pembahasan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi pendidikan karakter bagi warga binaan pada lembaga pemasyarakatan kelas II B kota gunungsitoli, bagaimana faktor pendukung dan penghambat dari implementasi pendidikan karakter bagi warga binaan pada lembaga pemasyarakatan kelas II B kota gunungsitoli dan bagaimana solusi yang dilakukan pihak Lembaga Pemasyarakatan dalam mengatasi faktor penghambat implementasi pendidikan karakter bagi warga binaan pada lembaga pemasyarakatan kelas II B kota gunungsitoli. Data yang dipaparkan dalam hasil penelitian pada bab sebelumnya akan dianalisis peneliti pada bab ini, sehingga peneliti dapat menarik kesimpulan dan memberikan rekomendasi yang sesuai dengan pihak terkait.

4.3.1 Implementasi Pendidikan Karakter Bagi Warga Binaan Pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Kota Gunungsitoli

Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Kota Gunungsitoli merupakan salah satu lembaga pemasyarakatan tertua yang ada di Sumatera Utara. Lembaga Pemasyarakatan ini awalnya dibangun oleh pemerintah kolonial belanda pada tahun 1925, yang dulu difungsikan sebagai penjara bagi

masyarakat pribumi yang melakukan kejahatan dan perlawanan bagi pemerintahan kolonial belanda pada masa itu. Lembaga Pemasyarakatan berguna untuk memberikan perbaikan kepribadian dan moral narapidana. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan berupa peraturan pemerintah yang memuat tentang pembinaan dan pembimbingan bagi warga binaan. Kebijakan pembinaan dan pembimbingan bagi warga binaan tertera di dalam peraturan pemerintah No 31 Tahun 1999 dan UU No. 22 Tahun 2022 tentang pemasyarakatan. Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Kota Gunungsitoli termasuk salah satu lembaga pemasyarakatan yang melaksanakan kebijakan ini.

4.3.2 ¹ Implementasi Kebijakan

Berhasil tidaknya dalam pelaksanaan suatu kebijakan ditentukan oleh banyak faktor. Van Metter dan Van Horn dalam Hasbullah (2015:97) mengatakan bahwa terdapat enam variabel dalam pelaksanaan kebijakan. Keenam variabel tersebut adalah standar dan tujuan kebijakan, sumber daya, komunikasi, interorganisasi dan aktivitas pengukuhan, karakteristik agen pelaksana dan kondisi sosial, ekonomi dan politik serta karakter pelaksana. Teori dari Van Metter dan Van Horn ini juga sekaligus memperkuat teori sebelumnya yang telah dikaji. Kebijakan pembinaan dan pembimbingan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Kota Gunungsitoli, ¹ telah memenuhi keenam variabel di atas. Hal ini dapat dibuktikan dari hasil penelitian sebagai berikut:

1) Tujuan Kebijakan

Suatu kebijakan dirumuskan tentu memiliki tujuan yang hendak dicapai. Tujuan kebijakan pembinaan dan pembimbingan diberikan kepada narapidana adalah untuk mengembalikan narapidana ke lingkungan masyarakat dengan memberikan bekal hidup berupa keterampilan kerja. Selain itu, kebijakan pembinaan dan pembimbingan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Kota Gunungsitoli juga bertujuan menjadikan narapidana sebagai warga negara yang lebih baik dari sebelumnya dengan menanamkan kepribadian maupun karakter yang baik. Setiap kegiatan yang dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Kota Gunungsitoli didalamnya diberikan nilai-nilai karakter yang bermanfaat untuk para narapidana. Kegiatan yang bermanfaat dan tata tertib yang berlaku di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Kota Gunungsitoli dapat mendukung tercapainya tujuan pemasyarakatan tersebut.

2) Sumber Daya

Melaksanakan kebijakan dibutuhkan sumber daya yang mendukung. Sumber daya tersebut dapat berupa sumber daya manusia, sumber dana maupun sarana dan prasarana yang mendukung. Sumber daya manusia yang dibutuhkan dalam melaksanakan kebijakan pembinaan dan pembimbingan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Kota Gunungsitoli adalah petugas pemasyarakatan, narapidana, BAPAS dan pihak ketiga. Setiap agen memiliki peran dan fungsi masing-masing, keempatnya tidak dapat dipisahkan satu sama lain.

Sumber daya yang kedua adalah sarana prasarana. Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Kota Gunungsitoli memiliki sarana prasarana diantaranya adalah rumah ibadah, aula, lapangan, balai, perpustakaan dan peralatan-peralatan yang digunakan untuk melaksanakan pembinaan kemandirian. Yang terakhir adalah sumber dana. Kebijakan pembinaan dan pembimbingan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Kota Gunungsitoli menggunakan dana APBN (Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara) dalam pelaksanaannya.

3) Komunikasi

Komunikasi merupakan kegiatan yang penting dalam melaksanakan suatu kebijakan. Komunikasi dibutuhkan untuk mengarahkan agen pelaksana melaksanakan kebijakan. Seluruh kegiatan dan penjabaran tugas dan fungsi pokok dari petugas pemasyarakatan sebagai agen pelaksana dilakukan melalui rapat. Semua tugas dibagi rata antar petugas pemasyarakatan. Kepala lembaga bertanggung jawab penuh terhadap segala bentuk kegiatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Kota Gunungsitoli.

Pelaksanaan pembinaan dan pembimbingan melibatkan pihak ketiga, adapun pihak ketiga tersebut adalah masyarakat, pengusaha maupun lembaga pemerintah. Pihak ketiga dapat membantu memasarkan produk-produk narapidana dan narapidana dapat memperoleh keuntungan tersendiri.

1 4) Interorganisasi dan Aktivitas Pengukuhan

Kebijakan yang telah dirumuskan tentu membutuhkan pengakuan dan pengesahan dari pemimpin. Pengukuhan merupakan kegiatan yang penting dalam siklus kebijakan. Pendidikan karakter melalui Kebijakan pembinaan dan pembimbingan di Lembaga Masyarakat Kelas II B Kota Gunungsitoli tidak ada aktivitas pengukuhan, karena aktivitas pengukuhan dilakukan di pemerintah pusat.

5) Karakteristik Agen Pelaksana

1
Agen pelaksana dari pelaksanaan pendidikan karakter melalui kebijakan pembinaan dan pembimbing bagi warga binaan masyarakat di Lembaga Masyarakat Kelas II B Kota Gunungsitoli adalah petugas masyarakat. Petugas masyarakat merupakan seorang pembina bagi narapidana. Selain berstatus pembina, seorang petugas masyarakat juga dapat memiliki status wali masyarakat. Kehidupan narapidana selama di lembaga masyarakat dipantau dan dibimbing oleh wali masyarakat. Hal ini dirasa penting karena dengan adanya wali masyarakat maka setiap narapidana dapat diubah kepribadiannya secara lebih mudah, dengan dilakukannya pendekatan individu.

Seorang pembina dan pembimbing tidak membutuhkan kualifikasi akademik seperti halnya dosen dan guru. Petugas masyarakat ikut membantu memberikan arahan kepada narapidana

yang kesulitan mengerjakan tugas mereka. Selain itu, petugas pemasyarakatan juga bekerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsi mereka di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Kota Gunungsitoli.

1 6) Kondisi Sosial, Ekonomi, Politik serta Karakter Pelaksana

Petugas pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Kota Gunungsitoli berjumlah 67 orang, semuanya berstatus sebagai pegawai negeri sipil. Seperti yang telah dijelaskan di atas, wali pemasyarakatan merupakan tugas tambahan. Namun demikian, hal tersebut tidak diikuti dengan adanya tambahan tunjangan. Gaji dan tunjangan diberikan sesuai dengan pangkat dan golongan pegawai negeri sipil tersebut. Tidak bertambahnya tunjangan maupun gaji seorang petugas pemasyarakatan tidak mengurangi semangat para petugas pemasyarakatan dalam bekerja. Petugas pemasyarakatan tetap bekerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

1 4.3.3 Tujuan Pendidikan Karakter

Seperti yang telah dijelaskan dalam bab II, bahwa tujuan dari implementasi pendidikan karakter melalui kebijakan pembinaan dan pembimbingan adalah memperbaiki moral warga binaan. Pelaksanaan pembinaan dan pembimbingan bagi warga binaan adalah bentuk dari pendidikan karakter di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Kota Gunungsitoli. Tujuan pendidikan karakter menurut Kesuma Dharma Dkk (2011:9-10) menyatakan bahwa tujuan dari pendidikan karakter ada tiga, diantaranya adalah : memfasilitasi penguatan dan pengembangan nilai-nilai,

mengkoreksi perilaku yang tidak sesuai dengan aturan dan membangun koneksi yang harmoni dengan keluarga dan masyarakat dalam memerankan tanggung jawab pendidikan karakter secara bersama. Pendidikan karakter di Lembaga Pemasarakatan Kelas II B Kota Gunungsitoli dilaksanakan melalui kebijakan pembinaan dan pembimbingan. Tujuan kebijakan pembinaan dan pembimbingan di Lembaga Pemasarakatan Kelas II B Kota Gunungsitoli, memiliki kesamaan dengan tiga tujuan pendidikan karakter menurut Kesuma Dharma. Hal ini dapat dibuktikan dari hasil penelitian sebagai berikut:

1) Memfasilitasi Penguatan dan Pengembangan Nilai-nilai

Kebijakan pembinaan dan pembimbingan bagi warga binaan menjadi sarana untuk memberikan pendidikan karakter bagi warga binaan. Pendidikan karakter bagi warga binaan di Lembaga Pemasarakatan Kelas II B Kota Gunungsitoli dilakukan dengan menekankan pada proses pembiasaan. Warga binaan melaksanakan pembinaan rohani seperti shalat dan sembayang di gereja setiap harinya. Selain pembinaan rohani, warga binaan melaksanakan pembinaan kemandirian setiap hari. Warga binaan menjadi lebih mandiri, disiplin, giat, kreatif dan religius melalui proses pembiasaan tersebut.

Dengan adanya proses pembiasaan yang dilakukan oleh warga binaan maka secara tidak langsung akan merubah pola hidup dan

kepribadian setiap hari. Dengan melakukan kebiasaan yang baik maka warga binaan akan bertindak yang baik pula. Hal ini dapat dimaklumi karena aturan dan tata tertib yang mengikat. Sehingga warga binaan akan berperilaku yang baik.

2) Mengkoreksi Perilaku yang Tidak Sesuai dengan Aturan

Warga binaan yang tidak menaati aturan dan tata tertib Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Kota Gunungsitoli akan diberi hukuman oleh pihak lapas. Sanksi tersebut berupa tidak diusulkan memperoleh remisi dan cuti. Sanksi yang lain adalah warga binaan dimasukkan ke dalam selker. Hal tersebut bertujuan untuk memperbaiki perilaku warga binaan yang menyimpang menjadi warga binaan yang baik. Hal ini dapat dimaklumi karena dengan memberikan sanksi maka warga binaan akan bertindak sesuai dengan aturan dan mengubah perilaku narapidana. Dengan adanya sanksi yang diberikan kepada narapidana maka tujuan dari pemasyarakatan sendiri dapat tercapai.

Petugas pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Kota Gunungsitoli menggunakan pendekatan persuasif untuk melakukan proses komunikasi. Petugas pemasyarakatan memberikan motivasi dan nasihat kepada warga binaan. Hal ini dirasa penting dilakukan karena masyarakat yang telah berstatus warga binaan tentu akan kehilangan rasa percaya diri di lingkungan masyarakat. Suntikan semangat dan motivasi akan menumbuhkan rasa percaya diri warga binaan dan rasa dihargai kembali ke dalam diri narapidana. Selain itu,

petugas pemasyarakatan juga menegur narapidana yang melakukan kesalahan, seperti saat ada narapidana yang memanjat di atas kamar mandi, petugas pemasyarakatan menegur narapidana untuk segera turun.

- 1) 3) Membangun Koneksi yang Harmoni dengan Keluarga dan Masyarakat dalam Memerankan Tanggung Jawab Pendidikan Karakter secara Bersama.

Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Kota Gunungsitoli bekerja sama dengan LKBH (Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum) dari Kementerian Agama, gereja-gereja dan Dinas Pendidikan dalam melaksanakan kebijakan pembinaan dan pembimbingan. LKBH bekerja sama dalam melaksanakan pembinaan rohani seperti pengajian rutin untuk warga binaan perempuan dan ibadah minggu untuk Non-Muslim. Sedangkan dinas pendidikan bekerja sama dalam melaksanakan pembinaan intelektual yaitu kejar paket.

1) 4.3.4 Metode Pendidikan Karakter

Pendidikan karakter penting diberikan kepada warga binaan. Pendidikan karakter dapat dilakukan melalui beberapa metode. Mulyasa (2013:9-10) berpendapat bahwa pendidikan karakter menekankan pada keteladanan, penciptaan lingkungan dan pembiasaan melalui kegiatan yang kondusif. Penciptaan lingkungan yang kondusif dapat dilakukan melalui beberapa metode, antara lain adalah penugasan, pembiasaan, pelatihan, pembelajaran, pengarahan dan keteladanan. Hal ini dapat dibuktikan dengan

adanya hasil penelitian bahwa Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Kota Gunungsitoli sering mengadakan pelatihan kerajinan tangan. Pelatihan ini bertujuan untuk memberikan keterampilan dan pengetahuan warga binaan. Selain pelatihan, petugas pemasyarakatan juga mengarahkan dan menasehati warga binaan agar dapat bersikap dan berkepribadian baik.

Petugas pemasyarakatan memberikan keteladanan kepada warga binaan berupa keikutsertaan petugas pemasyarakatan melaksanakan pembimbingan kemandirian dalam membuat kerajinan tangan. Dengan adanya petugas pemasyarakatan yang ikut bekerja, akan memunculkan semangat kerja bagi warga binaan. Pembinaan dan pembimbingan yang bersifat wajib bagi warga binaan tentu akan dilaksanakan oleh warga binaan setiap hari. Hal ini merupakan proses pembiasaan yang positif untuk warga binaan.

4.3.5 Subjek Pendidikan Karakter

Pendidikan karakter tidak dapat dilaksanakan oleh satu pihak saja. Agus Wibowo (2012:23) menyatakan bahwa pendidikan karakter tidak hanya dilakukan di pendidikan formal saja namun juga melalui pendidikan informal dan non formal. Pendidikan karakter merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah, masyarakat, keluarga dan sekolah. Pendidikan karakter di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Kota Gunungsitoli tidak hanya dilakukan oleh petugas pemasyarakatan dan warga binaan. Pihak Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Kota Gunungsitoli melakukan kerja sama dengan pihak ketiga. Pihak ketiga yang diajak bekerja sama dapat berupa lembaga

pemerintah, masyarakat, lembaga masyarakat, kementerian agama dan pendidikan.

Kejar paket yang dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Kota Gunungsitoli bekerja sama dengan dinas pendidikan setempat. ¹ Kerja sama yang dilakukan oleh pihak lembaga pemasyarakatan dengan pihak ketiga tentu akan memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak, terutama warga binaan. ¹ Warga binaan akan memperoleh pengalaman bekerja yang dapat dijadikan bekal hidup setelah keluar dari lembaga pemasyarakatan. Selain itu, dengan adanya kegiatan yang dilakukan dengan pihak ketiga maka warga binaan dapat mengisi waktu keseharian warga binaan selama di lembaga pemasyarakatan dengan kegiatan yang bermanfaat.

¹ 4.4 Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat Implementasi Kebijakan

Kebijakan pembinaan dan pembimbingan bagi narapidana dapat dikatakan berhasil apabila dapat terlaksana sesuai dengan tujuan dari kebijakan tersebut. Dampak yang di peroleh narapidana dari melaksanakan kebijakan pembinaan dan pembimbingan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Kota Gunungsitoli ¹ tidak lepas dari adanya faktor pendukung. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, ada tiga faktor pendukung dari pelaksanaan kebijakan pembinaan dan pembimbingan sebagai pendidikan karakter bagi narapidana. Faktor pertama adalah kebijakan pembinaan dan pembimbingan yang bersifat wajib bagi narapidana. Warga binaan yang telah ditetapkan sebagai narapidana maka berkewajiban menjalankan pembinaan dan pembimbingan yang dilaksanakan oleh pihak lembaga

pemasyarakatan. Dengan adanya kebijakan yang bersifat wajib maka narapidana terbiasa menjalankan kebijakan tersebut. Berdasarkan hasil penelitian, narapidana setiap hari melaksanakan pembinaan dan pembimbingan di lingkungan lapas. Hal ini sesuai dengan pendapat dari Mulyasa (2013:9-10) yang menyatakan bahwa salah satu metode dari pelaksanaan pendidikan karakter adalah melalui proses pembiasaan.

Faktor yang kedua adalah narapidana yang tertib dalam melaksanakan kebijakan pembinaan dan pembimbingan akan diusulkan memperoleh cuti, baik cuti menjelang bebas, cuti hari raya, cuti bersyarat hingga perolehan remisi. Berdasarkan hasil penelitian, pada tahap mapenaling (orientasi) pihak petugas pemasyarakatan memberikan sosialisasi mengenai hak dan kewajiban narapidana selama di lembaga pemasyarakatan. Salah satu yang disosialisasikan adalah keuntungan yang di dapat narapidana apabila melaksanakan segala tata tertib dan ketentuan selama di lembaga pemasyarakatan. Narapidana yang rutin menjalankan pembinaan dan pembimbingan serta menaati tata tertib yang ada, akan diusulkan untuk memperoleh cuti dan remisi.

Kebijakan pembinaan dan pembimbingan juga bertujuan untuk memberdayakan narapidana. Dengan melaksanakan kebijakan tersebut, narapidana memiliki berbagai keuntungan seperti memiliki keterampilan baru, memperoleh pengalaman bekerja, mengisi waktu luang narapidana, meningkatkan kemandirian narapidana, menyalurkan bakat dan minat narapidana dan tentu keuntungan memperoleh remisi dan cuti. Hasil penelitian ini sesuai dengan pernyataan dari Mulyasa (2013:18) yang menyatakan bahwa sosialisasi perlu dilakukan secara matang kepada berbagai pihak

agar pendidikan karakter yang ditawarkan dapat dipahami dan diterapkan secara optimal, karena sosialisasi merupakan langkah penting yang akan menunjang dan menentukan keberhasilan pendidikan karakter. Faktor yang ketiga adalah pelaksanaan kebijakan pembinaan dan pembimbingan bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Kota Gunungsitoli bekerja sama dengan LKBH dan dinas pendidikan dan kementerian agama atau gereja. Hasil penelitian ini selaras dengan pendapat Agus Wibowo (2012:45) yang menyatakan bahwa pelaksanaan pendidikan karakter dapat dilakukan melalui proses sosialisasi/penyadaran, pemberdayaan, pembudayaan dan kerjasama seluruh komponen bangsa. Pembangunan karakter dilakukan dengan pendekatan sistematis dan integratif dengan melibatkan keluarga, satuan pendidikan, pemerintah, masyarakat sipil, anggota legislatif, media massa, dunia kerja dan dunia industri.

Pelaksanaan kebijakan pembinaan dan pembimbingan tidak lepas dari adanya permasalahan maupun hambatan-hambatan. Faktor penghambat dari kebijakan pembinaan dan pembimbingan menyebabkan terhambatnya tujuan dari kebijakan pembinaan dan pembimbingan. Faktor penghambat dari pelaksanaan kebijakan pembinaan dan pembimbingan bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Kota Gunungsitoli adalah kurangnya motivasi narapidana dalam melaksanakan pembinaan dan pembimbingan.

Berdasarkan hasil penelitian, faktor penghambat dari kebijakan pembinaan dan pembimbingan adalah masih ada narapidana yang kurang motivasi dalam melaksanakan pembinaan dan pembimbingan. Narapidana yang tidak memiliki motivasi untuk melaksanakannya maka tujuan dari kebijakan itu sendiri tidak dapat

diperoleh narapidana. Selain minimnya motivasi, faktor sarana prasarana yang terbatas juga menjadi faktor penghambat pelaksanaan kebijakan pembinaan dan pembimbingan.

Sarana dan prasarana merupakan komponen yang penting dalam menyelenggarakan suatu kegiatan. Mulyasa (2013:24) berpendapat bahwa pendayagunaan fasilitas dan sumber belajar memiliki arti yang sangat penting, selain melengkapi, memelihara dan memperkaya khazanah belajar, sumber-sumber belajar juga dapat meningkatkan aktifitas dan kreatifitas belajar. Dengan demikian sarana dan prasarana merupakan faktor yang penting. Namun berdasarkan kenyataan di lapangan, pelaksanaan pembinaan dan pembimbingan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Kota Gunungsitoli masih memiliki kekurangan sarana dan prasarana. Hal ini dapat dibuktikan dengan tidak seimbangannya antara warga binaan yang mengikuti pembinaan kemandirian kerja dengan peralatan maupun prasarana yang ada dan begitu juga dengan ruangan atau bangunan yang terkhusus untuk membina karakter warga binaan.

Kurangnya sarana dan prasarana ini diakibatkan oleh anggaran yang terbatas dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Kota Gunungsitoli. Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Kota Gunungsitoli harus dapat menyelenggarakan pembinaan dan pembimbingan, mengingat pelaksanaan kebijakan tersebut memerlukan peralatan yang kurang sehingga di rasa kurang. Komponen anggaran atau biaya merupakan komponen yang sangat penting dan pokok dalam melaksanakan suatu kebijakan. Hal ini sesuai dengan pernyataan dari Novan Ardy

Wiyani (2012:49-50) menyatakan bahwa pembiayaan merupakan faktor yang penting dan menentukan kehidupan suatu organisasi atau lembaga. Komponen pembiayaan mendukung terselenggaranya proses pendidikan karakter.

1 4.5 Solusi dari Hambatan Implementasi Pendidikan Karakter

Setelah adanya faktor penghambat, tentu dibutuhkan solusi dari setiap faktor penghambat. Dalam hal ini, pihak Lembaga Pemasarakatan Kelas II B Kota Gunungsitoli **1** telah menemukan solusi dari hambatan-hambatan yang telah dipaparkan di atas. Solusi yang dibuat oleh pihak Lembaga Pemasarakatan adalah memberikan penghargaan kepada narapidana yang menaati segala tata tertib dan melaksanakan pembinaan dan pembimbingan. Penghargaan yang diberikan kepada narapidana berupa pengajuan cuti bersyarat, pengajuan remisi, pengajuan bebas bersyarat, cuti mengunjungi keluarga dan segala bentuk cuti lainnya. Pemberian penghargaan ini bertujuan untuk meningkatkan motivasi narapidana dalam melaksanakan kebijakan pembinaan dan pembimbingan.

Dengan memberikan penghargaan, narapidana akan bertindak sesuai dengan tata tertib yang berlaku di lembaga pemasarakatan. Hal ini dijadikan narapidana sebagai penyemangat dalam bekerja di lembaga pemasarakatan. Namun tentunya penghargaan tersebut harus benar-benar dikaji dan dipertimbangkan ketika akan diberikan kepada narapidana. Penghargaan harus diberikan kepada narapidana yang benar-benar pantas memperoleh penghargaan tersebut.

Selain pemberian penghargaan, petugas pemasarakatan juga memberikan sanksi hukuman kepada narapidana yang melakukan pelanggaran. Sanksi yang diberikan narapidana adalah tidak memberikan izin cuti, atau kunjungan keluarga kepada warga binaan. **1** Selain itu, petugas pemasarakatan juga melakukan pendekatan individu untuk meningkatkan motivasi narapidana. Pasalnya, masyarakat yang pernah berstatus narapidana tentu akan kehilangan kepercayaan

diri narapidana ketika masuk ke dalam lingkungan masyarakat kembali. Sehingga suntikan semangat tersebut dirasa penting untuk narapidana. Dengan memberikan suntikan semangat, maka narapidana akan merasa masih ada yang peduli dengan kondisi dan keadaannya ketika berada di dalam lembaga pemasyarakatan.

Hal ini sesuai dengan pendapat dari Mulyasa (2013:64-65) yang menyatakan bahwa seorang pendidik harus mampu membangkitkan motivasi peserta didik, antara lain dengan memperhatikan prinsip-prinsip peserta didik akan bekerja keras apabila ia memiliki minat dan perhatian terhadap suatu pekerjaan, memberikan tugas yang jelas dan dapat dimengerti, memberikan penghargaan terhadap hasil kerja dan prestasi peserta didik, menggunakan hadiah dan hukuman secara efektif dan tepat guna.

Solusi yang terakhir dilakukan oleh pihak lembaga pemasyarakatan Kelas II B Kota Gunungsitoli¹ adalah mengajukan proposal ke Kantor Wilayah Hukum dan HAM Sumatera Utara untuk menambah sarana dan prasarana yang kurang. Sarana prasarana merupakan hal yang penting dalam pelaksanaan kebijakan pembinaan dan pembimbingan karena tanpa sarana dan prasarana, kegiatan yang ada tidak dapat berjalan dan tujuan dari pemasyarakatan sendiri tidak dapat tercapai. Dengan adanya kekurangan sarana prasarana yang dimiliki Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Kota Gunungsitoli¹ saat ini, maka sangat penting untuk melakukan penambahan sarana dan prasarana yang mendukung. Mengingat jumlah narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Kota Gunungsitoli yang banyak.

4.6 Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini telah diusahakan dan dilaksanakan sesuai dengan prosedur ilmiah, namun demikian masih memiliki keterbatasan yaitu:

- a) Jangkauan rumah peneliti dengan tempat penelitian cukup memakan waktu banyak sehingga peneliti tidak selalu sering untuk datang ke tempat penelitian.
- b) Waktu penelitian yang dibatasi yaitu pukul 08.00 hingga 12.00 WIB.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat diperoleh kesimpulan bahwa:

1. Implementasi Pendidikan Karakter bagi Warga Binaan pada Lembaga

Pemasyarakatan Kelas II B Kota Gunungsitoli

Pendidikan karakter bagi warga binaan pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Kota Gunungsitoli¹ sudah berjalan sesuai dengan tujuan. Tujuan dari pendidikan ini adalah mengembalikan warga binaan ke lingkungan masyarakat dengan memberikan bekal hidup berupa keterampilan kerja dan penanaman kepribadian maupun karakter yang baik. pembinaan ini bersifat wajib bagi warga binaan. Sumber daya manusia yang dibutuhkan dalam pelaksanaan kebijakan pembinaan dan pembimbingan adalah petugas pemasyarakatan, warga binaan dan pihak ketiga yang diajak bekerja sama. Pendidikan ini diimplementasikan melalui kegiatan jasmani, rohani, intelektual dan kemandirian. Dari setiap kegiatan yang dilakukan warga binaan, disisipkan nilai-nilai karakter yang baik untuk warga binaan. Adapun nilai-nilai karakter tersebut adalah nilai religius, nilai kejujuran, nilai disiplin, nilai hidup sehat, nilai mandiri, nilai jiwa wirausaha, nilai pantang menyerah, nilai berpikir kreatif dan inovatif, nilai giat bekerja. Metode yang digunakan oleh petugas pemasyarakatan dalam melaksanakan pembinaan dan pembimbingan sebagai pendidikan karakter adalah dengan melakukan pendekatan

individual, pendekatan persuasif, keteladanan, pelatihan, praktik langsung dan pembiasaan.

2. Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Kebijakan

Faktor pendukung dalam pelaksanaan pendidikan karakter bagi warga binaan pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Kota Gunungsitoli yaitu: a) warga binaan yang taat dan tertib; b) adanya pihak ketiga yang diminta untuk bekerja sama dalam hal pemasaran hasil produksi narapidana dan menjadi motivator dalam kegiatan pengajaran bagi muslim dan ibadah kristen rutin warga binaan; c) d) sifat kebijakan yang wajib diikuti oleh warga binaan.

Sedangkan faktor penghambat dari pelaksanaan pendidikan karakter bagi warga binaan pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Kota Gunungsitoli yaitu: a) motivasi warga binaan dalam melaksanakan pembinaan dan pembimbingan yang kurang; b) sarana prasarana dan anggaran yang terbatas; c) pemasaran yang masih kecil.

3. Solusi dari Hambatan Implementasi pendidikan karakter

Solusi dari hambatan pelaksanaan pendidikan karakter bagi warga binaan pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Kota Gunungsitoli adalah Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam pelaksanaan pembinaan dan pembimbingan adalah: a) memberikan kepada para warga binaan berupa pengusulan cuti mengunjungi keluarga serta segala bentuk cuti lainnya. Selain pemberian cuti, warga binaan yang melanggar peraturan akan dikenai sanksi berupa perolehan hukuman selama enam hari kerja yaitu

dimasukkan ke dalam Selker; b) memberikan motivasi kepada warga binaan, dan c) mengajukan proposal untuk penambahan sarana prasarana yang kurang ke Kantor Wilayah Hukum dan HAM SUMUT.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan hasil penelitian yang telah dikemukakan di atas, saran yang diberikan peneliti adalah:

1. Bagi Lembaga Pemasyarakatan

Berdasarkan dari permasalahan-permasalahan yang telah dipaparkan di dalam bab 4, sebaiknya pihak Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Kota Gunungsitoli dapat menjalin kerja sama dengan pihak ketiga lebih banyak lagi guna mendukung terselenggaranya pembinaan pendidikan karakter yang efektif dan efisien. Selain itu, lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Kota Gunungsitoli perlu melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pembinaan pendidikan karakter secara rutin setiap minggu atau bulan, guna mengukur ketercapaian tujuan pemasyarakatan.

2. Bagi Petugas Pemasyarakatan

Melihat masih ada warga binaan yang kurang termotivasi melaksanakan pembinaan pendidikan karakter, maka pihak petugas pemasyarakatan sebagai pembina, pembimbing dan wali pemasyarakatan dapat lebih melakukan pendekatan dengan warga binaan guna memberikan dukungan dan motivasi secara persuasif.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Agus Wibowo. (2012). *Pembinaan Karakter: Strategi Membangun Karakter Bangsa Berperadaban*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Akhmad Muhaimin Azzet. (2011). *Urgensi Pembinaan Karakter di Indonesia: Revitalisasi pembinaan karakter terhadap keberhasilan belajar dan kemajuan bangsa*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Dwidja Priyatno. (2006): *Sistem Pembinaan Pemasarakatan*. Bandung: Refika Aditama.
- Masnur Muslich. (2014). *Pendidikan Karakter Menjawab Tantangan Krisis Multi-dimensional*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Muchlas Samani dan Hariyanto. (2013). *Konsep dan Model Pendidikan Karakter*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Mulyasa. (2011). *Manajemen Pendidikan Karakter*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Mulyasa. (2013). *Manajemen Pendidikan Karakter*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Miftah Thoha. (2008). *Manajemen Pembinaan dan Pengamplikasian*. Jakarta: Kencana.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan.
- Sudarto. (1986). *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: Penerbit Alumni.
- Zubaedi. (2011). *Desain Pendidikan Karakter : Konsepsi dan Aplikasinya dalam Lembaga Pendidikan*. Jakarta : Kencana.

B. Jurnal

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. (2016). *Pembimbingan*. Diakses dari <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Pembimbingan> pada 11 Juni 2017, pukul 10.05 WIB.

Fadjri Prathama. (2015). *Pelaksanaan Tindakan Pembinaan Terhadap Narapidana yang Melanggar Peraturan Keamanan dan Ketertiban di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Padang*. Fakultas Hukum Universitas Tamansiswa Padang. Diakses melalui www.journal.unitas-pdg.ac.id pada 19 Januari 2017, pukul 19.23 WIB.

Fitriyani Rohmawati. (2015). *Implementasi Pembinaan Karakter Bagi Warga Binaan Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Pekalongan*. Diakses dari <http://elc.stain-pekalongan.ac.id/id/eprint/771> pada 19 Januari 2017, pukul 19.06 WIB.

IMPLEMENTASI PENDIDIKAN KARAKTER BAGI WARGA BINAAN PADA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II B KOTA GUNUNGSITOLI

ORIGINALITY REPORT

54%

SIMILARITY INDEX

54%

INTERNET SOURCES

8%

PUBLICATIONS

12%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	eprints.uny.ac.id Internet Source	40%
2	digilibadmin.unismuh.ac.id Internet Source	6%
3	docplayer.info Internet Source	2%
4	www.lapasgunungsitoli.com Internet Source	1%
5	Submitted to University System of Georgia Student Paper	1%
6	repository.uin-suska.ac.id Internet Source	1%
7	journal.ikipgunungsitoli.ac.id Internet Source	1%
8	Submitted to Universitas Nasional Student Paper	1%

core.ac.uk

Exclude quotes On

Exclude matches < 1%

Exclude bibliography On